

Profil

Perkembangan Kependudukan

2023



Buku Profil Perkembangan Kependudukan
Book Profile of Population Development
Tahun 2023



Gambar Cover oleh :

Cover Design by :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon
Cirebon Population and Civil Registration Office

Diterbitkan oleh/*Publish by :*

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon
Cirebon Population and Civil Registration Office

Ukuran Buku/*Book Size :*

210 x 297 mm

Jumlah Halaman/*Number of Page :*

116 Halaman/*Page*

Naskah/*Manuskrip :*

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon
Cirebon Population and Civil Registration Office

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/ atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/ or copy part or all of this book for commercial purpose without permission from Cirebon Population and Civil Registration Office



KATA PENGANTAR




Dengan rasa syukur dan penuh rasa hormat, penyusun menyampaikan puji dan terimakasih kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan petunjuk-Nya yang senantiasa melimpah dalam setiap langkah hidup kita.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2023 ini disusun sebagai informasi statistik perkembangan kependudukan Kota Cirebon yang berasal dari Data Base Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Proses penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2023 ini melibatkan tahap pengumpulan data, analisis mendalam dan evaluasi. Penyusun menyadari bahwa setiap langkah dalam proses ini memerlukan ketekunan dan konsentrasi dan semangat untuk menyajikan data yang tepat dan akurat.





Penyusun menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dan memberikan dukungan dalam perjalanan penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2023.

Meskipun upaya telah dilakukan untuk menyajikan informasi seakurat mungkin, penyusun menyadari bahwa Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2023 tidak lepas dari keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat dihargai untuk perbaikan di masa depan.

Akhir kata, penyusun berharap Buku Profil Perkembangan Kependudukan



Tahun 2023 dapat memberikan informasi dan inspirasi bagi pembaca. Semoga buku ini dapat menjadi sumbangan kecil namun berarti dalam pembangunan di Kota Cirebon.

Terimak Kasih



DAFTAR ISI

2

Kata Pengantar

4

Daftar Isi

8

Bab 1 Pendahuluan

8

Latar Belakang

10

Tujuan

11

Ruang Lingkup

12

Pengertian Umum

19

Bab II Gambaran Umum daerah

23

Gambaran Umum Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon

29

Letak Geografis



30

Kondisi Demografi Daerah

41

Bab III Sumber Data

43

Bab IV Perkembangan Kependudukan

43

Jumlah Penduduk

44

Jumlah dan Persebaran Penduduk

45

Jumlah Penduduk per kelurahan

50

Grafik Jumlah Penduduk

51

Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin

53

Umur Median

56

Kepadatan Penduduk

59

Rasio Jenis Kelamin

63

Piramida Penduduk

64

Rasio Ketergantungan

66

Angka Perkawinan Kasar

69

Angka Perkawinan Umum (AKU)

72

Rata-rata Umur Perkawinan Pertama
(*Singulate Mean Age At Marriage*)

75

Angka Perceraian Kasar (Divorce)

77

Angka Perceraian Umum

78

Jumlah Kepala Keluarga

81

Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah
Anggota Keluarga

83

Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan
Status Kawin

85

Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan
Pendidikan



87

Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan
Status Kerja

88

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

95

Penduduk Berdasarkan agama dan
Kepercayaan

96

Penduduk Berdasarkan Jenis kecacatan

97

Kualitas Penduduk

99

Mobilitas Penduduk

101

Bab V Kepemilikan Dokumen

108

Bab VI Kesimpulan



BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG



Pembangunan merupakan perjalanan suatu bangsa untuk mencapai tujuannya, yaitu masyarakat yang sejahtera. Pembangunan dilakukan dengan terencana untuk mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik. Apabila aspek-aspeknya pembangunan diperhatikan dan diperhitungkan, maka pembangunan akan berhasil. Salah satu aspek yang penting dalam pembangunan adalah aspek kependudukan, sehingga informasi perkembangan kependudukan merupakan informasi strategis dan sangat diperlukan dalam perencanaan, kebijakan serta





evaluasi pembangunan
berwawasan kependudukan
yang berkelanjutan.

Pembangunan yang
berwawasan kependudukan
adalah pembangunan yang
diselaraskan dengan potensi
dan kondisi penduduk yang
ada di suatu wilayah. Oleh
karena itu ketersediaan data
kependudukan di semua
tingkat administrasi
pemerintahan menjadi faktor
kunci keberhasilan program-
program pembangunan.
Profil perkembangan
kependudukan menyajikan
informasi tentang kondisi dan
karakteristik penduduk Kota
Cirebon untuk memenuhi
kebutuhan data



kependudukan bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) di Kota Cirebon.




TUJUAN

Penyusunan buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Cirebon Tahun 2023 bertujuan untuk menyajikan data kependudukan serta memberikan gambaran kondisi, perkembangan dan proses kependudukan Kota Cirebon Tahun 2023. Profil Perkembangan Kependudukan secara umum dapat dipergunakan sebagai

bahan acuan penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah. Perencanaan merupakan tolak ukur kinerja pembangunan daerah dan penentuan target kinerja pembangunan. Sedangkan secara khusus pemanfaatan informasi perkembangan kependudukan tahun 2023 dimanfaatkan sebagai rujukan data untuk :

1. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat kota.



- 
2. Perencanaan kebijakan kependudukan daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
 3. Penentuan target kinerja keluaran dan sasaran program pembangunan daerah terkait program-program pembangunan yang pro poor, pro job dan pro growth dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan daerah.
 4. Pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik dan jaminan sosial masyarakat.
 5. Pengembangan pembangunan baik secara kelembagaan ataupun perseorangan dalam rangka partisipasi pembangunan masyarakat.

RUANG LINGKUP


Ruang lingkup Profil
Perkembangan



Kependudukan Kota Cirebon Tahun 2023 memuat deskripsi dan analisis implikasi atas data :

1. Kuantitas penduduk, meliputi jumlah dan komposisi beserta persebaran penduduk, penduduk menurut demografi;



- 
2. Kualitas penduduk meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial;
 3. Mobilitas (Migrasi) penduduk baik migrasi keluar maupun migrasi masuk;
 4. Kepemilikan dokumen kependudukan, meliputi Kartu Keluarga (KK), KTP, KIA, Akta-Akta dan surat keterangan.

PENGERTIAN UMUM

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

ANGKA PERKAWINAN KASAR



Angka yang menunjukkan persentasi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada tahun tertentu.

ANGKA PERKAWINAN UMUM (AKU)

Angka yang menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada suatu tahun tertentu.



ANGKA PERCERAIAN KASAR



Angka yang menunjukkan jumlah perceraian per 1000 penduduk terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan pada pertengahan tahun untuk tahun tertentu.

ANGKA PERCERAIAN UMUM

Angka yang menunjukkan banyaknya penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada suatu tahun tertentu.

KUANTITAS PENDUDUK

Jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal



KEPADATAN PENDUDUK

Angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah dalam satuan km^2 pada tahun tertentu.

KUALITAS PENDUDUK

Kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat

kesehatan,

pendidikan,

pekerjaan,

produktivitas,

tingkat sosial,

ketahanan,

kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudi daya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.



KELUARGA INTI (NUCLEAR FAMILY)

Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak kandung, anak angkat maupun anak adopsi yang belum kawin, atau ayah dan anak-anak belum kawin, atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin.



KEMATIAN

Suatu peristiwa menghilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.



KARTU KELUARGA/KK

Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

KARTU TANDA PENDUDUK/KTP

Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



MOBILITAS PENDUDUK

Gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota atau Propinsi).



PENDUDUK

Warga Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.



PROFIL PERKEMBANGAN PENDUDUK

Kumpulan data dan informasi tentang perkembangan

kependudukan dalam bentuk tertulis, yang mencakup segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan.

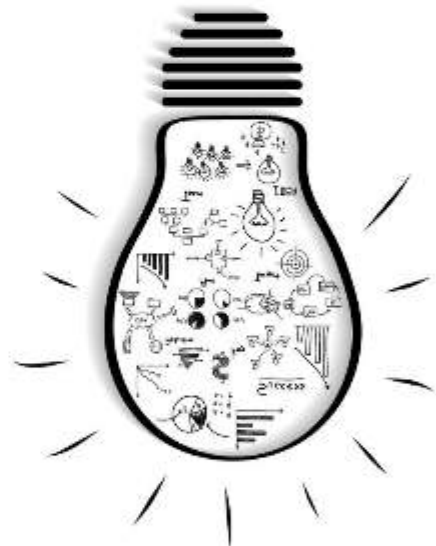


RASIO JENIS KELAMIN/RJK

Angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dalam waktu tertentu, dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 1000 penduduk perempuan.

RATA-RATA UMUR KAWIN PERTAMA (*SINGULATE MEAN AGE MARRIAGE/SMAM*)

Perkiraan (estimasi) rata-rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang masih lajang (belum kawin).



UMUR MEDIAN

Bilangan umur yang menunjukkan posisi di tengah-tengah kelompok data umur, sehingga membagi dua kelompok data umur yakni kelompok yang lebih muda dari umur median dan kelompok umur yang lebih tua dari umur median.





BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

SEJARAH DISDUKCAPIL KOTA CIREBON SEJARAH SINGKAT

Perjalanan dan perjuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon telah mengalami pasang surut. Potensi sumberdaya, kelamahan dan kekurangan terus diperbaiki. Tantangan terus dihadapi supaya dapat mengikuti perubahan zaman. Peluang dan potensi terus menerus digali dan dikembangkan dalam bentuk inovasi demi perbaikan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan.

EKSISTENSI

Eksistensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tidak terlepas dari dukungan pemerintah khususnya dan para tokoh masyarakat.

Berkat dorongan itu pula sampai saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dapat terus melayani masyarakat Kota Cirebon.



- Masa penjajahan sampai dengan tahun 1960 : Kantor Keresidenan (Kantor Pembantu Gubernur Wilayah III Cirebon), dikenal juga dengan nama Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) yang menyelenggarakan pencatatan sipil untuk Kota Besar Cirebon.

- Tahun 1960 – 1983 : Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, merupakan tugas pembantuan (*Madebewind*) dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

- Tahun 1983 – 2000 : Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon (merupakan tingkat wilayah) berdasarkan





Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil, pelaksanaannya di bawah Departemen Dalam Negeri.

- Tahun 2000 – 2004 : Dinas Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon, berdasarkan Peraturan daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Kota Cirebon).

- Tahun 2004 – 2008 : Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon.

- Tahun 2008 – Sekarang : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor Seri D, Tambahan Lembaran



Daerah Kota Cirebon Nomor 21)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Dinas-Dinas Daerah



pada Pemerintahan kota Cirebon (Lembaran daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor Seri D, Tambahan Lembaran




Daerah kota Cirebon Nomor 37) melaksanakan tugas-tugas kependudukan yang lainnya.

GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Cirebon merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Pelayanan yang diberikan yaitu terkait dengan dokumen pendaftaran penduduk (pencatatan biodata penduduk, NIK, penerbitan Kartu Keluarga, penerbitan KTP-el, KTP-el khusus, penerbitan KIA, penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran peristiwa






kependudukan, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dan pendaftaran penduduk non permanen) dan pelayanan pencatatan sipil seperti dokumen dokumen Akta (kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, peristiwa penting lainnya, pembetulan akta dan pembatalan akta). Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon berada di Kompleks Perkantoran Bima Jl. Brigjen Dharsono (By Pass) Kota Cirebon.

DASAR HUKUM PELAKSANAAN PELAYANAN

Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Cirebon merupakan salah satu wujud dari pelayanan publik yang pelaksanaannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang





Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kota Cirebon telah menindaklanjuti per-Undang-Undangan tersebut dengan Peraturan daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.


TUPOKSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan wali Kota Cirebon Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.

INOVASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mempunyai moto GAMPIL, berusaha melayani masyarakat dengan melaksanakan prinsip Gratis, Aman Mudah, Praktis, Ikhlas dan Luar






biasa. Selain itu juga selalu membuat inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Cirebon. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 470/052-DISDUKCAPIL/2023 berikut adalah inovasi-inovasi yang telah dikembangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon :

NO	NAMA	RUANG LINGKUP	KETERANGAN
1	Kelakon Pitulas	Pelayanan perekaman KTP-el pemula berumur 17 tahun di sekolah-sekolah	Pencetakan KTP-el bagi yang berumur 17 tahun
2	Kelakon Ning RW	Pelayanan Kartu keluarga dan perekaman KTP-el di RT/RW	Pelayanan jemput bola Kartu keluarga dan KTP-el sesuai permintaan RT/RW
3	Kelakon buntel	a. Pelayanan pindah datang b. Pelayanan Kartu Keluarga c. Pelayanan KTP-el	Pelayanan terintegrasi Pindah/Datang, Kartu Keluarga dan KTP-el
4	Kelakon Ditonggoni	Pelayanan Pencetakan KTP-el	Pencetakan KTP-el langsung jadi bagi pemohon yang bersangkutan pemilik KTP-el hilang dan rusak
5	Kelakon Ning Bocah	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Pelayanan pemanfaatan KIA

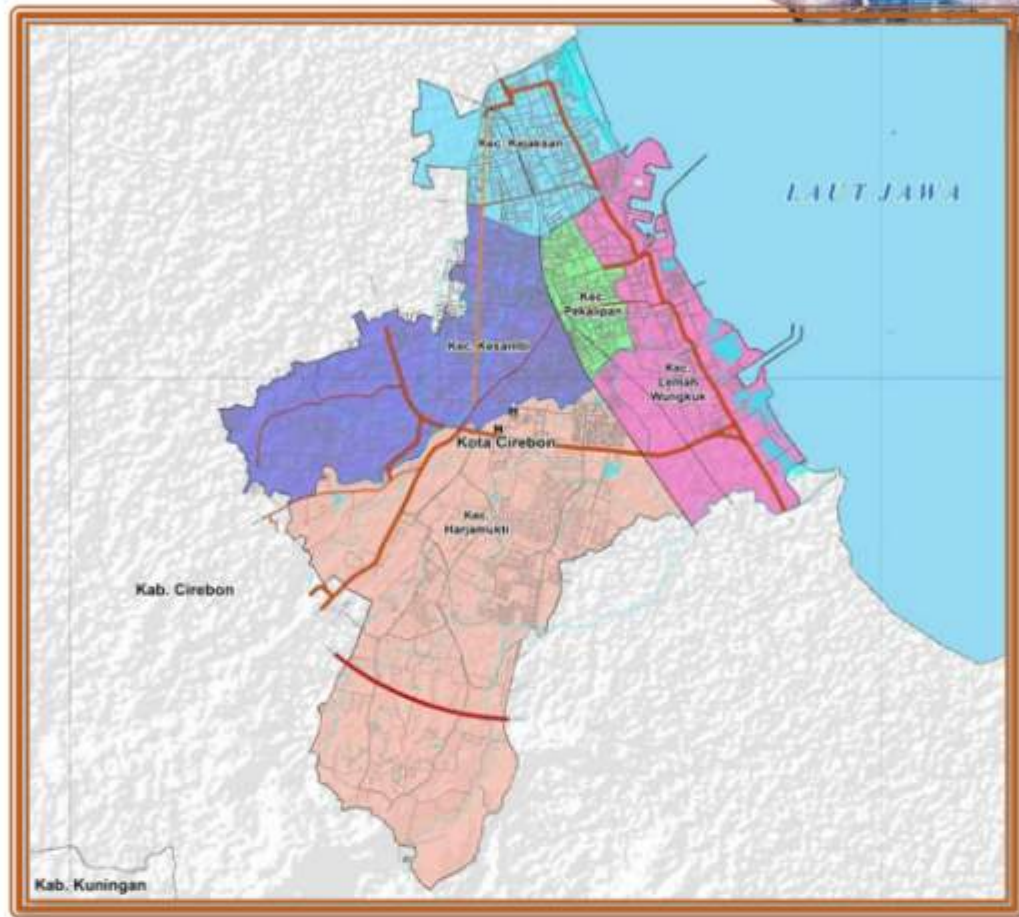


6	Kelakon Ning Kampus	Pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el	Perekaman dan Pencetakan KTP-el di lingkungan kampus
7	Lamunan Indah (pelayanan mudah Identitas penduduk berhijab)	Pelayanan penerbitan KTP-el wanita yang berhijab	Pelayanan penggantian foto KTP-el wanita yang belum berhijab menjadi berhijab
8	Brojol Aja Klalen (Akta Kelahiran Langsung Jadi Kalo Daftar Secara Online)	a. Pelayanan Kartu Keluarga b. Pelayanan Akta Kelahiran c. Pelayanan Kartu Identitas Anak	Pelayanan penerbitan KK, akta Kelahiran dan KIA bekerjasama dengan Bidan
9	Uis Tamat (Uang Insentif Akta Kematian)	Pemberian Insentif untuk pengiris RT/RW yang melaporkan kematian warganya	Pemberian Insentif untuk pengiris RT/RW yang melaporkan kematian warganya
10	Kemat Kakek (Akta kematian, KK dan KTP-el)	a. Pelayanan Akta Kematian b. Pelayanan Kartu Keluarga c. Pelayanan KTP-el	Pelayanan terintegrasi Akta Kematian, Kartu Keluarga dan KTP-el
11	Padu Brojol Jadi Siji (Akta Kelahiran, Kartu keluarga, dan KIA)	1. Pelayanan Akta Kelahiran 2. Pelayanan Kartu Keluarga 3. Pelayanan KIA	Pelayanan terintegrasi Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA
12	Simadu Kakeku (Akta Perkawinan, KTP-el dan Kartu Keluarga)	1. Pelayanan Akta Perkawinan 2. Pelayanan Kartu Keluarga 3. Pelayanan KTP-el	Pelayanan terintegrasi Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP-el



13	Padu Enake (KTP-el, KK dan Akta Perceraian)	1. Pelayanan akta Perceraian 2. Pelayanan Kartu Keluarga 3. Pelayanan KTP-el	Pelayanan terintegrasi penerbitan Akta Perceraian, Kartu Keluarga dan KTP-el
14	Jebol Ning RW	Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil ke RW	Pelayanan keliling Pencatatan Sipil sesuai permintaan RT/RW
15	Jebolan Ngemas Batas (Jemput Bola Pelayanan Akta Kelahiran di Wilayah Perbatasan)	Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran	Jemput Bola Pelayanan Akta Kelahiran di Wilayah Perbatasan
16	Dugi Teng Griya	Pelayanan Pengantaran KTP-el	Pengantaran KTP-el bagi pemilih pemula
17	Sinanik (Sistem Antrian Berbasis NIK)	Layanan pendaftaran Online	Pendaftaran Nomor Antrian melalui WhatsApp
18	Pelayanan Prioritas Tanpa Antrian	Pelayanan bagi Lansia, Disabilitas Orang Sakit dan Ibu Hamil tua	Pelayanan prioritas bagi Lansia, Disabilitas Orang Sakit dan Ibu Hamil tua

LETAK GEOGRAFIS



Luas wilayah Kota Cirebon adalah 39,47 km² dengan batas-batas wilayah :

Sebelah Utara : Sungai Kedung Pane

Sebelah Barat : Banjir Kanal/ Kabupaten Cirebon

Sebelah Selatan : Sungai Kalijaga

Sebelah Timur : Laut Jawa

KONDISI DEMOGRAFI DAERAH

Bersumber dari Data Konsolidasi Bersih Kementerian Dalam Negeri,

Penduduk Kota Cirebon pada tanggal 31 Desember 2023 berjumlah



352.347 jiwa terdiri dari 176.706 penduduk laki-laki dan 175.641

penduduk

perempuan.

Jumlah penduduk terbanyak ada di yakni 128.587 jiwa.



Kecamatan Harjamukti

Hal ini berbanding dengan luas wilayah terluas yakni 17,601 km².

Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Pekalipan

sebanyak 31.423 jiwa, namun karena Kecamatan Pekalipan memiliki

wilayah tersempit yakni hanya 1,585 km² maka Kecamatan

Pekalipan merupakan kecamatan terpadat penduduknya yakni

19.825,24 jiwa per km², dua kali lipat lebih dari kepadatan penduduk

kota



TRANSPORTASI



Sistem transportasi darat melalui jalan raya dihubungkan dengan 2 (dua) buah terminal yaitu Terminal Bus Harjamukti (Type A) dengan luas 2.948 m² yang berfungsi untuk layanan antar wilayah dan Terminal Dukuh Semar (Type B) dengan luas 1.252 m² yang berfungsi sebagai pelayanan angkutan kota. Kota Cirebon dilalui jalur Kereta Api lintas Jakarta – Surabaya melalui Semarang dan Yogyakarta. Jalur tersebut dihubungkan oleh 2 (dua) buah Stasiun yaitu Stasiun Kejaksan dan Stasiun Parujakan yang melayani rute Cirebon – Jakarta dan Cirebon – Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. Kota Cirebon memiliki satu buah simpul transportasi laut yakni pelabuhan Muarajati. Pelabuhan ini



merupakan satu-satunya pelabuhan ekspor-impor di wilayah Jawa Barat.

Kota Cirebon juga memiliki pelabuhan Udara yaitu Bandara Cakrabuana Penggung yang terletak di Jalan Jendral Sudirman



arah selatan kota menuju kota Kuningan. Bandara ini baru dapat didarati oleh pesawat jenis Cessna dan N-230. Penggunaan sekarang diarahkan untuk kegiatan pelatihan sekolah penerbangan. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon, panjang jalan di Kota Cirebon pada tahun 2023 mencapai 183,172 Km yang terdiri dari jalan nasional sepanjang 15,78 Km, jalan provinsi 8,70 Km, dan jalan kabupaten/kota 159,172 km.



BIDANG KESEHATAN

Untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Cirebon didukung dengan sarana



dan prasarana yang cukup lengkap. Sarana kesehatan di Kota Cirebon pada tahun 2023, terdiri dari 10 rumah sakit, terdiri dari 2 Rumah Sakit Tipe B dan 5 Rumah Sakit Tipe C dan 3 Rumah Sakit Tipe D. Selain Rumah Sakit juga terdapat 22 Puskesmas, 10 Puskesmas Pembantu dan 4 Poned.

Dalam menunjang bidang Kesehatan di Kota Cirebon juga terdapat 78 Klinik, 83 Praktek Dokter, 117 Apotek, 23 Toko Obat, dan 9 laboratorium Mandiri. Sedangkan tenaga kesehatan terdiri dari 259 Dokter Spesialis, 100 Dokter Gigi, 376 Dokter Umum, 1.599 Perawat dan 552 Bidan.



PENDIDIKAN

Jumlah sekolah yang ada di Kota Cirebon terdiri dari Taman Kanak-Kanak sebanyak 91 sekolah, Raudhatul Athfal (RA) sebanyak 47, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 163 terdiri dari 125 Sekolah Negeri dan 38 Sekolah Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 20. Di tingkat Tingkat Pertama sebanyak 50 Sekolah, terdiri dari 18 SLTP Negeri dan 32 SLTP Swasta. Madrasah Tsanawiyah (MTs)

sebanyak 12 terdiri dari 2 MTs Negeri dan 10 MTs Swasta. Di tingkat Menengah Atas sebanyak 28 sekolah, terdiri dari 9 sekolah Negeri dan 19 Sekolah Swasta. Sekolah Kejuruan atau SMK sebanyak 28 sekolah, terdiri 2 SMK Negeri dan 26 SMK Swasta. Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 8 sekolah, terdiri dari 2 Sekolah Negeri dan 6 Sekolah Swasta.



Selain sekolah, perguruan tinggipun banyak yang berlokasi di Kota Cirebon, yakni IAIN Syekh Nurjati, Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG),



Universitas Swadaya Gunungjati (UNSWAGATI) dan Universitas CIC. Beberapa Sekolah Tinggi yang ada di Kota Cirebon adalah Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon (STTC), Institut Teknologi dan Kesehatan (ITEKES) Mahardika, Stikes BPH, juga telah berdiri Politeknik Tenaga Kesehatan (Poltekkes) Negeri Kementerian Kesehatan, Akbid Muhamadiyah, dan Akper Dharma Husada.



KEBUDAYAAN DAN KESENIAN

Tari topeng (panji, kelana, samba/pamindo, tumenggung, rummyang), Tari Bedaya Rimbe, Tari Sekar Keputren, Tari Bedaya Kajongan, Tari Penyenggrama, Tari Ronggeng Munggut, Tari Manggong, Tari Beksan Tangis Kinjeng, Wayang Kulit, Wayang wong, Wayang golek cepak, Wayang purwa, Wayang Babad, Tarling, Sintren, Rudat, Genjring Sulap, Kuntulan, Masres, Debus, Bengberokan, Genjring Santri, Jaran Lumping, Ronggeng Bugis (pasukan telik sandi), Gembyung, Gong Renteng, dan lain-lain.



KULINER

Kota Cirebon banyak dikunjungi wisatawan domestik karena terkenal dengan kulinernya. Tidak jarang datang ke Kota Cirebon hanya untuk menikmati kuliner. Beberapa kuliner khas Cirebon yaitu Nasi Jamblang, Nasi Lengko, Empal Gentong, Empal Asem, Mie Koclok, Tahu Gejrot, Sate Kalong, Teh Poci, Docang, Terasi Udang, Kerupuk Melarat, Kerupuk Kulit (lambak), Jambal Roti, Sirup Campolay, Botok Roti, Sega/nasi Bogana, Cemplung, Bubur Lemu, Bubur Lolos, Blengep, Nasi Rosul, Nasi Krawu, Jaletot, Kerupuk Udang, Kerupuk Upil,

Tapel, Cikak, Growol, Cikoi, Petis, Kue Apem, Kue Cimplong, dan lain-lain.



ADAT/ TRADISI

Nadran, Sinoman, Ngunjung, Sedekah bumi, Bebesik, Mapagsri, Kirab Sawan/Nglarab (Rebo wekasan), Muludan, Cap go meh, Imlek, Kliwonan Grebeg Syawal, Penganten Cirebonan (kebesaran dan pangeranan), Upacara tradisi keraton (bubur suraan, siraman panjang, hajat sabrah/boreh/ukup, panjang jimat, upacara sekitar siklus hidup manusia, sekatenan, siraman gong sekaten), Ngupat (hamil 4 bulan), Nebus Weteng (hamil 7 bulan), Ngelolosi (hamil menjelang 9 bulan), Puputan (lepas tali pusar), Ruwwatan (saat bayi berusia 7 hari), Nyukur (bayi berusia 40 hari), Mudun Lemah Sunat Punar (peneguhan keimanan anak perempuan sebelum akil baligh).



CAGAR BUDAYA

Balaikota Cirebon (Riadhuis Cheribon), Gedung Karesidenan Tangkil,
Gedung Bank Indonesia, Gedung Bank Mandiri, Gedung Eks Kantor
Pangkalan TNI AL, Mesjid Al Athyah (Mesjid Abang/Mesjid Merah



Panjunan), Mesjid Agung Sang Cipta Rasa, Mesjid Baitul
Karim/Pesambangan,

Klenteng Talang, Klenteng Winaon/Klenteng Boen San Tong, Vihara
Dewi Welas Asih, Stasiun Kereta Api Kejaksan, Stasiun Kereta Api
Parujakan, Gedung PT BAT Company,





Pabrik Tenun Perujakan Menara PDAM Perujakan, Rumah Sakit Umum Gunungjati/Orange Hospital, Gedung Bank BNI, Gedung Cipta Niaga, Gedung Kantor POS Indonesia, Mesjid Agung At Taqwa/Tajug Agung Cirebon, Hotel gajah, Situs Kejawanan, Dan lain-lain.



BAB III

SUMBER DATA



Sebagian besar data dalam buku profil ini diperoleh dari Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. Data awal



Konsolidasi Bersih Tahun 2023. Data

yang digunakan adalah Data Semester 2 Konsolidasi

Bersih dan database SIAK diolah sehingga dapat menjadi informasi dalam bentuk profil perkembangan penduduk tahun 2023.



Ada pula data yang diambil dari bidang lain, yakni dari Bidang Pencatatan Sipil, data terkait umlah penerbitan dan kepemilikan akta-akta akta_akta



pencatatan sipil dari peristiwa perkawinan dan perceraian penduduk non_muslim serta peristiwa penting lainnya. Data Berdasarkan register pelayanan dan data lainnya yang tidak terakomodir dalam database SIAK.

Selain dari bidang Pelayanan Pencatatan Sipil juga data yang bersumber dari Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Data yang diambil adalah tentang kepemilikan dokumen kependudukan, yakni tentang kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) serta jumlah terjadinya migrasi masuk maupun migrasi keluar.



BAB IV

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN



Jumlah Penduduk

Kota Cirebon
per Kecamatan

Kota Cirebon

Laki-Laki = 176.706
Perempuan = 175.641
Jumlah = 352.347

Harjamukti

Laki-Laki = 64.809
Perempuan = 63.778
Jumlah = 128.587

Kejaksan

Laki-Laki = 25.346
Perempuan = 25.922
Jumlah = 51.268

Pekalipan

Laki-Laki = 15.793
Perempuan = 15.630
Jumlah = 31.423

Lemahwungkuk

Laki-Laki = 30.760
Perempuan = 30.313
Jumlah = 61.073

Kesambi

Laki-Laki = 39.998
Perempuan = 39.998
Jumlah = 79.996



Berdasarkan SK Wali Kota

Nomor: 470/Kep. 48-DISDUKCAPIL/2024

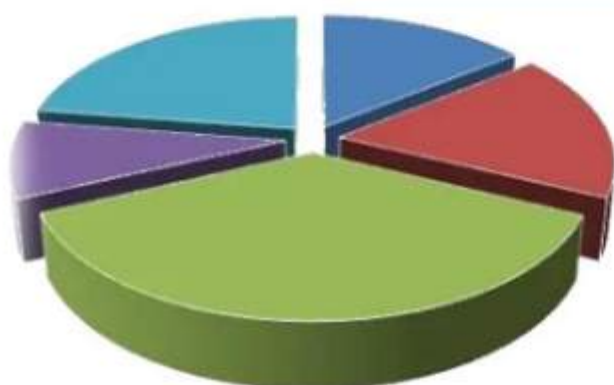


JUMLAH DAN PERSEBARAN PENDUDUK

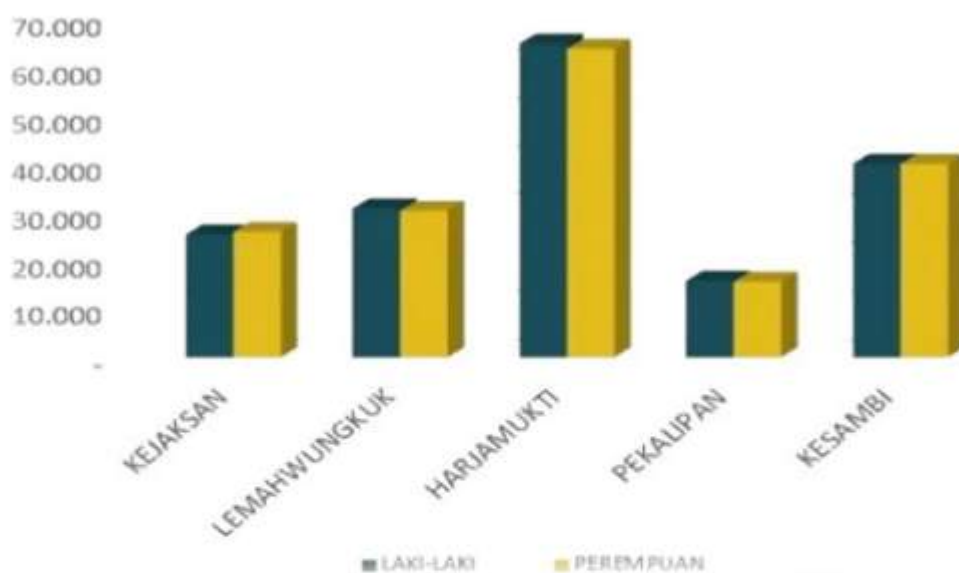


GRAFIK

Jumlah Penduduk



- KEJAKSAN
- LEMAHWUNGKUK
- HARJAMUKTI
- PEKALIPAN
- KESAMBI





Jumlah Penduduk per Kelurahan

Kecamatan Kejaksan

Laki-Laki = 25.346
Perempuan = 25.922
Jumlah = 51.268

Kelurahan Kesenden

Laki-Laki = 7.102
Perempuan = 7.257
Jumlah = 14.359

Kelurahan Kejaksan

Laki-Laki = 4.985
Perempuan = 5.178
Jumlah = 10.163

Kelurahan Kebonbaru

Laki-Laki = 4.683
Perempuan = 4.879
Jumlah = 9.562

Kelurahan Sukapura

Laki-Laki = 8.576
Perempuan = 8.608
Jumlah = 17.184



Berdasarkan SK Wali Kota

Nomor: 470/Kep.48-DISDUKCAPIL/2024



Jumlah Penduduk per Kelurahan

Kecamatan Lemahwungkuk

Laki-Laki = 30.760
Perempuan = 30.313
Jumlah = 61.073

Kelurahan Kesepuhan

Laki-Laki = 8.754
Perempuan = 8.527
Jumlah = 17.281

Kelurahan Pegambiran

Laki-Laki = 12.357
Perempuan = 11.949
Jumlah = 24.306

Kelurahan Panjunan

Laki-Laki = 5.214
Perempuan = 5.371
Jumlah = 10.585

Kelurahan Lemahwungkuk

Laki-Laki = 4.435
Perempuan = 4.466
Jumlah = 8.901



Berdasarkan SK Wali Kota
Nomor: 470/Kep.48-DISDUKCAPIL/2024



Jumlah Penduduk per Kelurahan

Kecamatan Harjamukti

Laki-Laki = 64.809
Perempuan = 63.778
Jumlah = 128.587

Kelurahan Kecapi

Laki-Laki = 12.016
Perempuan = 12.314
Jumlah = 24.330

Kelurahan Kalijaga

Laki-Laki = 19.290
Perempuan = 18.745
Jumlah = 38.035

Kelurahan Larangan

Laki-Laki = 8.134
Perempuan = 8.618
Jumlah = 16.752

Kelurahan Harjamukti

Laki-Laki = 11.553
Perempuan = 11.254
Jumlah = 22.807

Kelurahan Argasunya

Laki-Laki = 13.816
Perempuan = 12.847
Jumlah = 26.663



Berdasarkan SK Wali Kota

Nomor: 470/Kep.48-DISDUKCAPIL/2024



Jumlah Penduduk per Kelurahan

Kecamatan Pekalipan

Laki-Laki = 15.793
Perempuan = 15.630
Jumlah = 31.423

Kelurahan Pulasaren

Laki-Laki = 4.052
Perempuan = 3.939
Jumlah = 7.991

Kelurahan Jagasatru

Laki-Laki = 5.435
Perempuan = 5.306
Jumlah = 10.741

Kelurahan Pekalangan

Laki-Laki = 3.060
Perempuan = 3.080
Jumlah = 6.140

Kelurahan Pekalipan

Laki-Laki = 3.246
Perempuan = 3.305
Jumlah = 6.551



Berdasarkan SK Wali Kota
Nomor: 470/Kep.48-DISDUKCAPIL/2024



Jumlah Penduduk per Kelurahan

Kecamatan Kesambi

Laki-Laki = 39.998
Perempuan = 39.998
Jumlah = 79.996

Kelurahan Kesambi

Laki-Laki = 4.578
Perempuan = 4.677
Jumlah = 9.255

Kelurahan Pekiringan

Laki-Laki = 6.354
Perempuan = 6.618
Jumlah = 12.972

Kelurahan Drajat

Laki-Laki = 7.982
Perempuan = 7.909
Jumlah = 15.891

Kelurahan Sunyaragi

Laki-Laki = 6.528
Perempuan = 6.506
Jumlah = 13.034

Kelurahan Karyamulya

Laki-Laki = 14.556
Perempuan = 14.288
Jumlah = 28.844



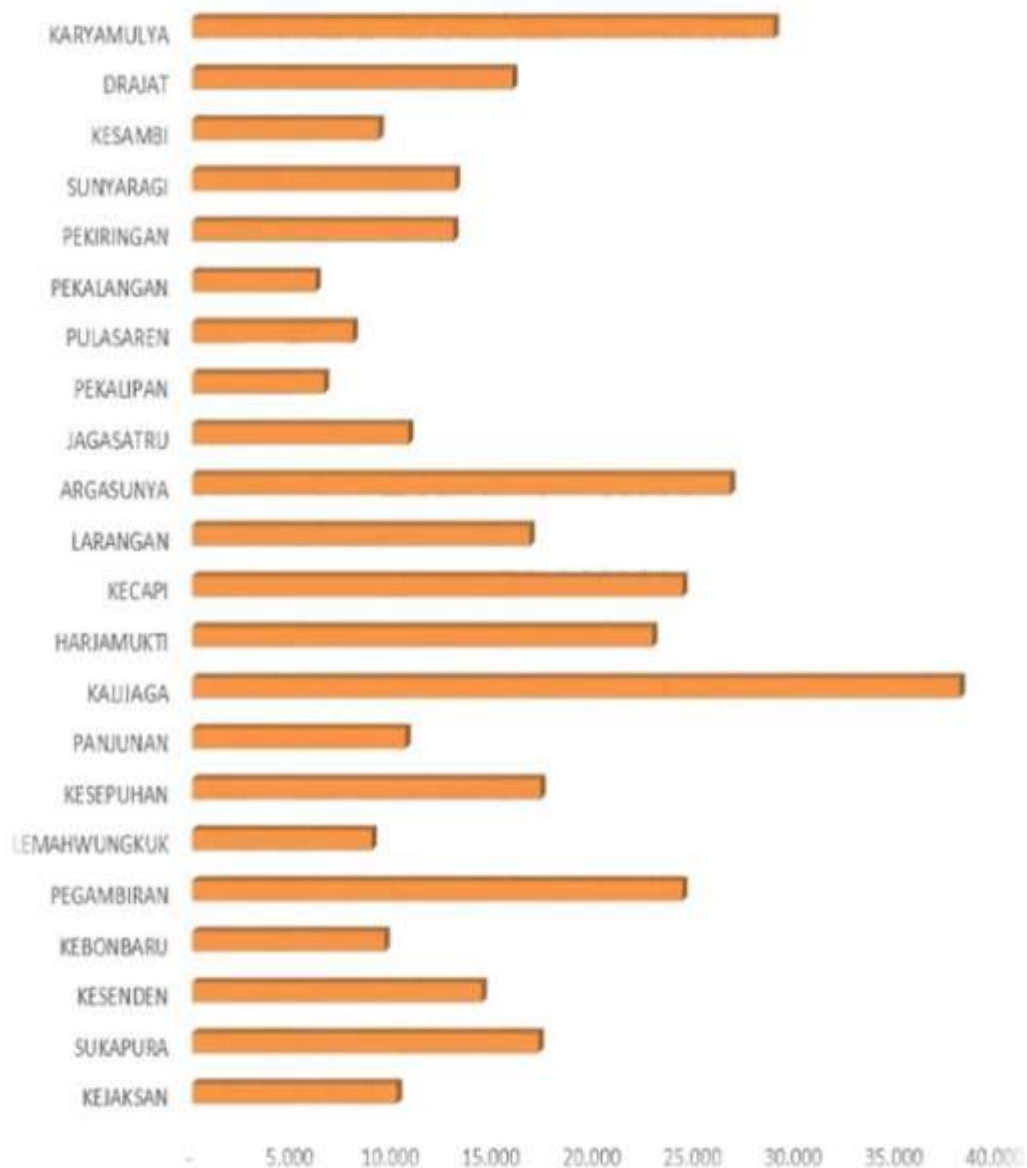
Berdasarkan SK Wali Kota

Nomor: 470/Kep.48-DISDUKCAPIL/2024



GRAFIK

Jumlah Penduduk





Jumlah Penduduk

Menurut Jenis Kelamin

0 - 4

Laki-Laki = 13.714
Perempuan = 13.003
Jumlah = 79.996

20 - 24

Laki-Laki = 15.271
Perempuan = 14.238
Jumlah = 29.509

5 - 9

Laki-Laki = 15.262
Perempuan = 14.221
Jumlah = 29.483

25 - 29

Laki-Laki = 14.529
Perempuan = 13.915
Jumlah = 28.444

10 - 14

Laki-Laki = 15.429
Perempuan = 14.681
Jumlah = 30.110

30 - 34

Laki-Laki = 13.759
Perempuan = 12.965
Jumlah = 26.724

15 - 19

Laki-Laki = 14.970
Perempuan = 14.196
Jumlah = 29.116

35 - 39

Laki-Laki = 12.598
Perempuan = 12.157
Jumlah = 24.755





Jumlah Penduduk

Menurut Jenis Kelamin

40 - 44

Laki-Laki = 14.099
Perempuan = 13.897
Jumlah = 27.996

60 - 64

Laki-Laki = 6.174
Perempuan = 7.431
Jumlah = 13.605

45 - 49

Laki-Laki = 12.200
Perempuan = 12.490
Jumlah = 24.690

65 - 69

Laki-Laki = 4.631
Perempuan = 5.559
Jumlah = 10.190

50 - 54

Laki-Laki = 10.542
Perempuan = 10.952
Jumlah = 21.494

70 - 74

Laki-Laki = 2.962
Perempuan = 3.420
Jumlah = 6.382

55 - 59

Laki-Laki = 8.291
Perempuan = 9.018
Jumlah = 17.309

≥ 75

Laki-Laki = 2.275
Perempuan = 3.498
Jumlah = 5.773



UMUR MEDIAN

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Menghitung Umur Median)

Usia	Jumlah	Kumulatif	% Kumulatif
0 - 4	26.717	26.717	7,58
5 - 9	29.483	56.200	15,95
10 - 14	30.110	86.310	24,50
15 - 19	29.166	115.476	32,77
20 - 24	29.509	144.985	41,15
25 - 29	28.444	173.429	49,22
30 - 34	26.724	200.153	56,81
35 - 39	24.755	224.908	63,83
40 - 44	27.996	252.904	71,78
45 - 49	24.690	277.594	78,78
50 - 54	21.494	299.088	84,88
55 - 59	17.309	316.397	89,80
60 - 64	13.605	330.002	93,66
65 - 69	10.190	340.192	96,55
70 - 74	6.382	346.574	98,36
75 +	5.773	352.347	100



Umur *median* adalah bilangan umur yang menunjukkan posisi ditengah-tengah kelompok data umur, sehingga membagi dua kelompok data umur yakni kelompok yang lebih muda dari umur median dan kelompok umur yang lebih tua dari median.

Umur median dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{Umur Median } (M_d) = I_{MD} + \left[\frac{\frac{N}{2} - f_x}{f_{Md}} \right] \times i$$

I_{Md} = Batas bawah kelompok umur yang mengandung $N/2$ yaitu Interval yang mengandung frekuensi 176.173 yaitu 30.

N = Jumlah penduduk total = 352.347

f_x = Jumlah penduduk komulatif sampai dengan kelompok umur yang mengandung $N/2 = 200.153$ maka $f_x = 173.429$

f_{Md} = Jumlah penduduk pada kelompok umur dimana terdapat nilai $N/2 = 26.724$

I = Kelas Interval umur = 5



Catatan:

Kategori umur penduduk :

- Penduduk muda, jika umur median kurang dari 20 tahun
- Penduduk intermediate, jika umur median antara 20-30 tahun
- Penduduk tua, jika umur median lebih dari 30 tahun



Umur Median :

$$\begin{aligned}M_d &= 30 + ((352.347/2) - 173.429) : (26.724) \times 5 \\&= 30 + ((176.173 - 173.429) : (26.724) \times 5 \\&= 30 + (2.744 : 26.724) \times 5 \\&= 30 + (0,1027 \times 5) \\&= 30 + 0,5135 \\&= 30,5135\end{aligned}$$

$$M_d = 31$$

Interpretasi :

Dari perhitungan diperoleh umur median 31 artinya, limapuluh persen dari penduduk Kota Cirebon pada Tahun 2023 berusia dibawah 31 tahun, limapuluh persen lainnya, berusia lebih dari 31 tahun. Karena umur median berada pada usia 31 tahun maka penduduk kota Cirebon termasuk kelompok usia tua.



KEPADATAN PENDUDUK

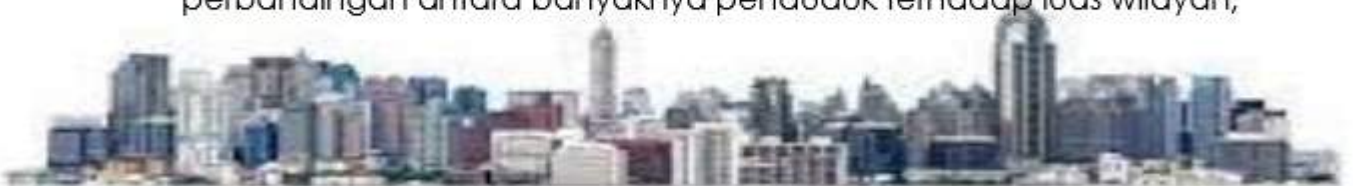
Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami




perubahan dari tahun ke tahun karena perubahan jumlah penduduk dari satu wilayah/area, baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah ke suatu daerah lainnya. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu satuan keruangan.

Kepadatan penduduk yaitu angka yang menyatakan

perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah,





atau berapa banyaknya penduduk per-kilometer persegi pada periode tahun tertentu. Rasio kepadatan penduduk dihitung dengan rumus :

$$D = \left(\frac{P}{A} \right)$$

D = Kepadatan Penduduk

P = Jumlah penduduk di suatu wilayah

A = Luas wilayah dalam km²

Untuk kepadatan penduduk tingkat Kota Cirebon diperoleh :

$$D = \left(\frac{P}{A} \right)$$

$$D = 352.347 : 39,464$$

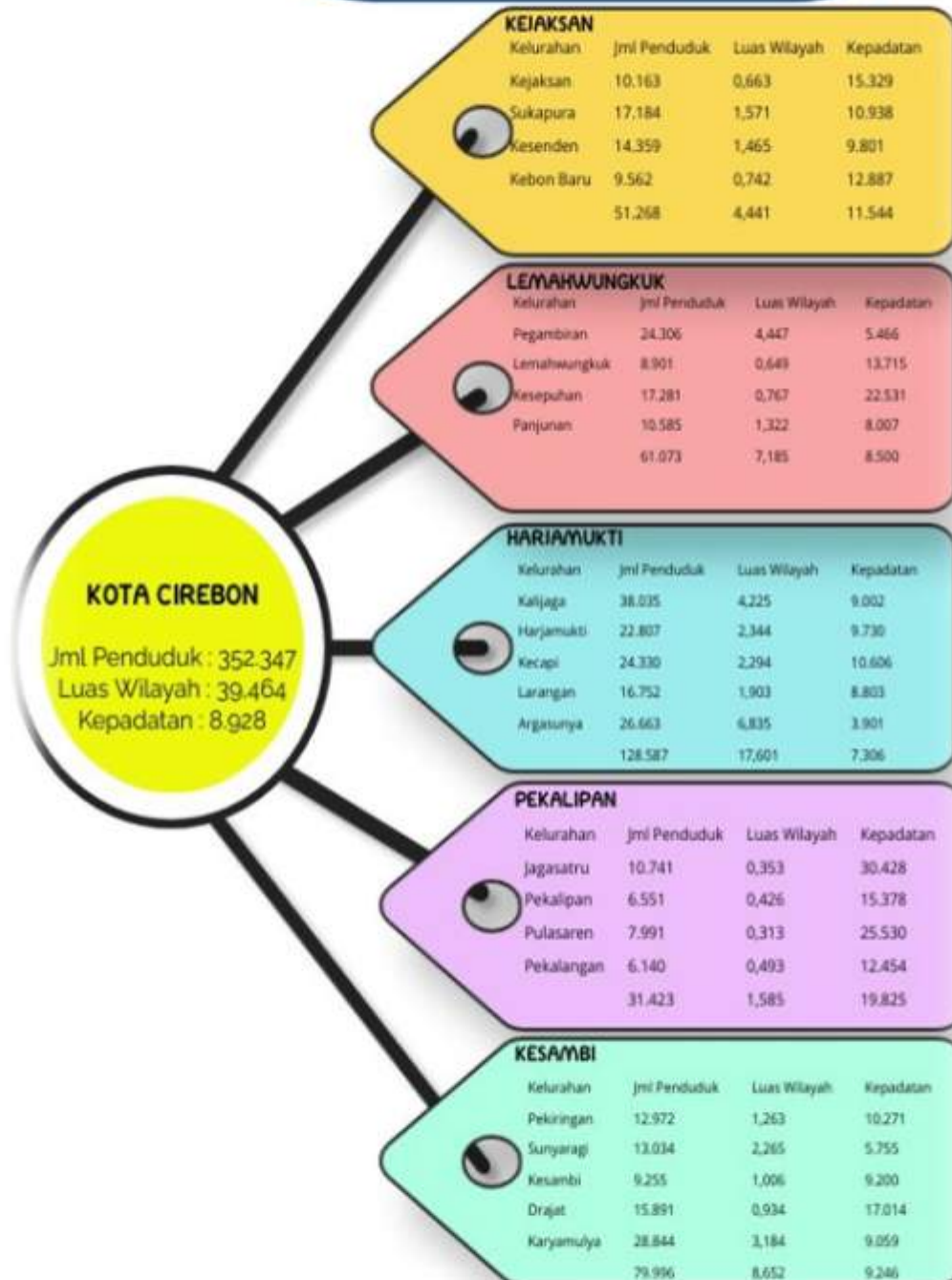
Diperoleh angka kepadatan penduduk kota (D Kota) = **8.928**

Interpretasi :

Di setiap luas 1 km² wilayah Kota Cirebon pada tahun 2023, dihuni oleh 8.928 orang penduduk.



Kepadatan Penduduk





RASIO JENIS KELAMIN

Rasio jenis kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Besar kecilnya rasio jenis kelamin ini dipengaruhi oleh :

- Rasio jenis kelamin waktu lahir (*sex ratio at birth*), biasanya perbandingan antara bayi laki-laki dan perempuan pada waktu lahir berkisar antar 102-104 bagi laki-laki per 100 bayi perempuan.
- Pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan perempuan
- Pola migrasi antara penduduk laki-laki dan perempuan

Informasi tentang rasio jenis kelamin dapat disajikan menurut kelompok umur maupun wilayah dalam bentuk tabel maupun grafik. Informasi ini dapat berguna untuk perencanaan pembangunan berwawasan gender.



Rasio

Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	RJK
0 - 4	13.714	13.003	26.717	105.47
5 - 9	15.262	14.221	29.483	107.32
10 - 14	15.429	14.681	30.110	105.10
15 - 19	14.970	14.196	29.166	105.45
20 - 24	15.271	14.238	29.509	107.26
25 - 29	14.529	13.915	28.444	104.41
30 - 34	13.759	12.965	26.724	106.12
35 - 39	12.598	12.157	24.755	103.63
40 - 44	14.099	13.897	27.996	101.45
45 - 49	12.200	12.490	24.690	97.68
50 - 54	10.542	10.952	21.494	96.26
55 - 59	8.291	9.018	17.309	91.94
60 - 64	6.174	7.431	13.605	83.08
65 - 69	4.631	5.559	10.190	83.31
70 - 74	2.962	3.420	6.382	86.61
≥ 75	2.275	3.498	5.773	65.04

$$RJK = \left(\frac{\sum L}{\sum P} \right) \times K$$

RJK = Rasio Jenis Kelamin

$\sum L$ = Jumlah penduduk laki-laki

$\sum P$ = Jumlah penduduk perempuan

K = Konstanta = 100 penduduk perempuan



$$\begin{aligned} RJK &= (\sum L : \sum P) \times 100 \\ &= (176.706 : 175.641) \times 100 \\ &= 1,00606 \times 100 \\ &= 100,606 \end{aligned}$$

$$RJK = 101$$

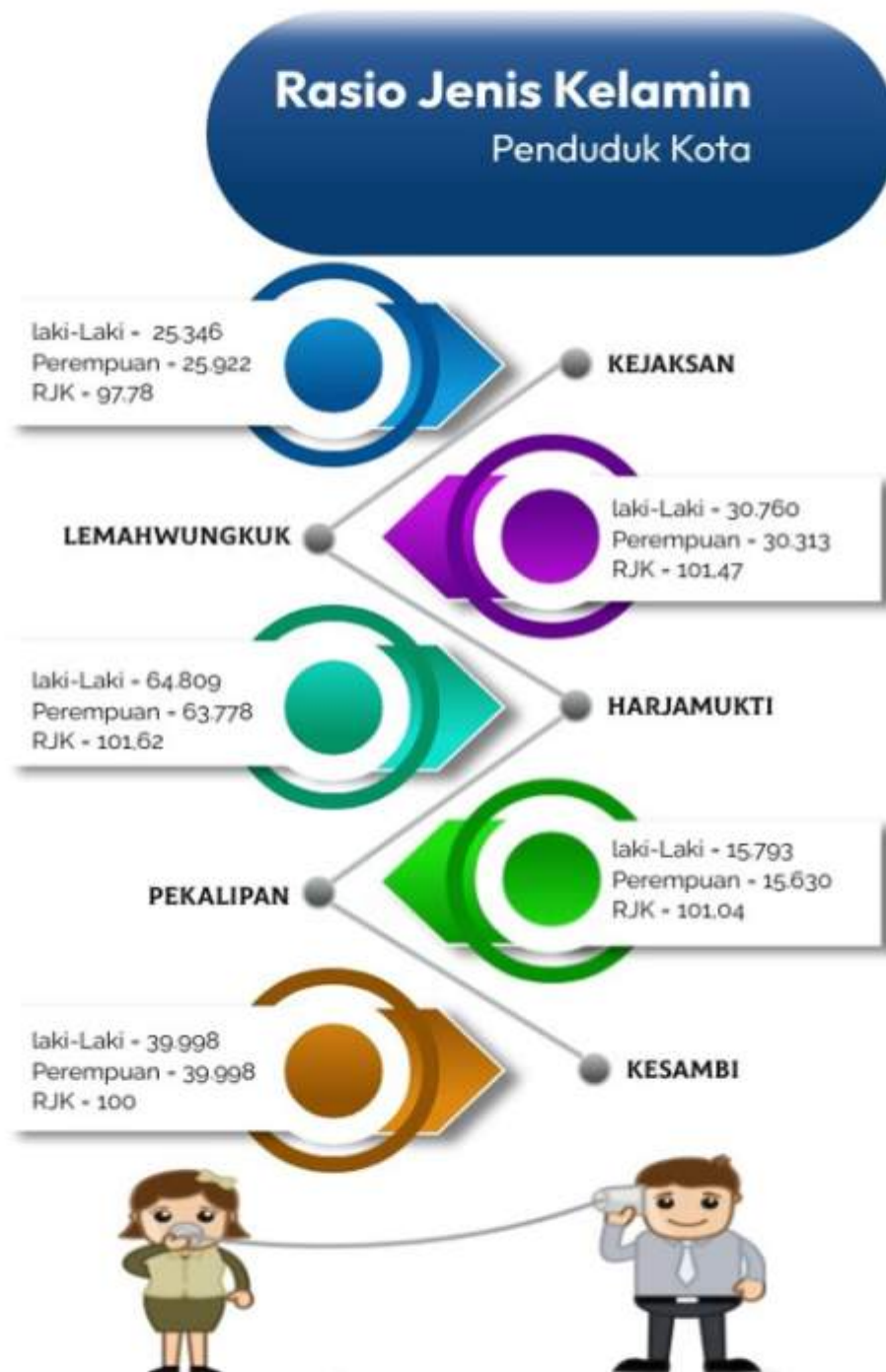
Interpretasi :

Bahwa di Kota Cirebon pada tahun 2023, perbandingan penduduk perempuan dan laki-laki yaitu dari 100 penduduk perempuan terdapat 101 orang penduduk laki-laki.

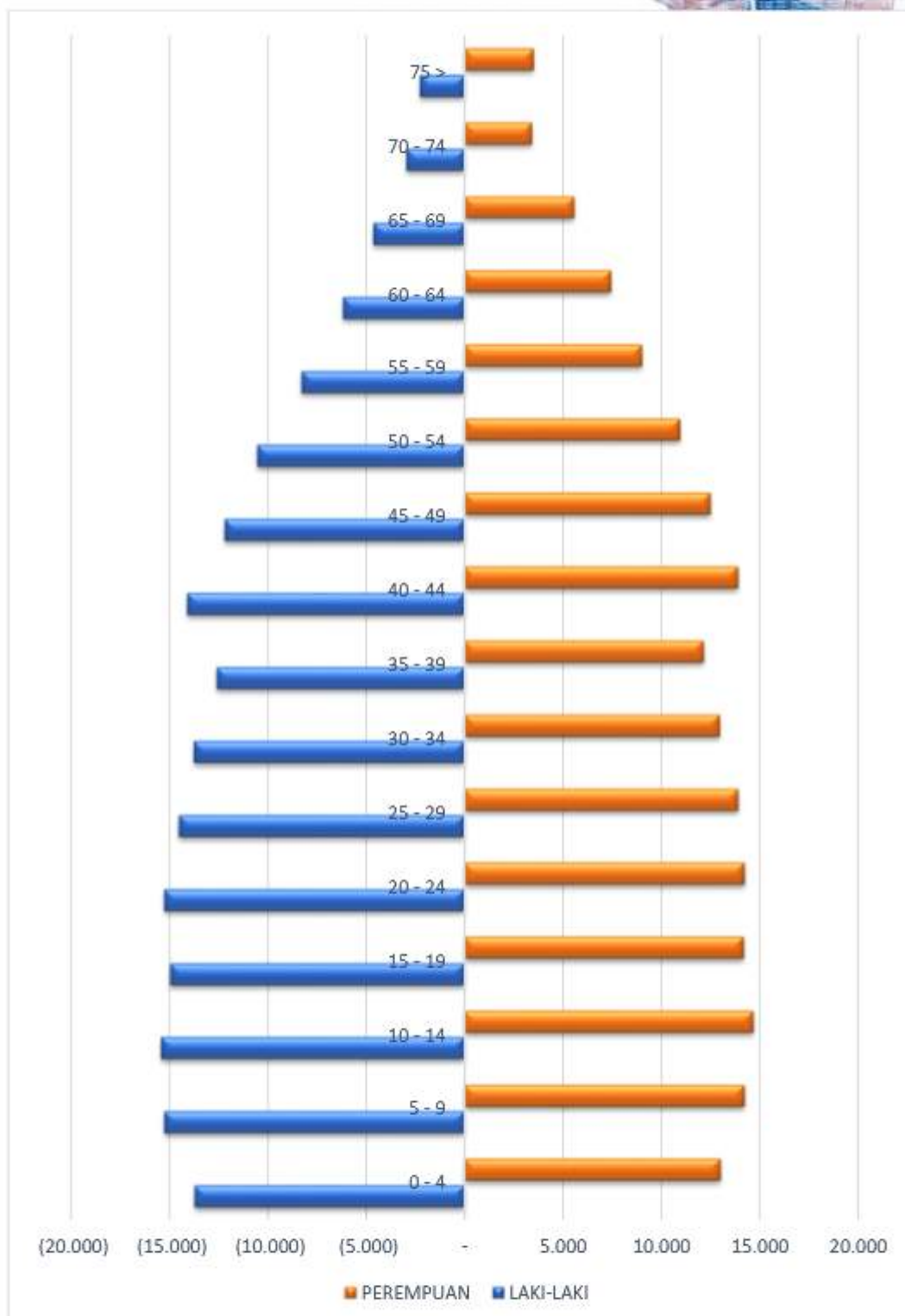
Rasio jenis kelamin tertinggi ada di kelompok umur 5 - 9 tahun yakni 107,32 dan rasio jenis kelamin terendah terletak pada kelompok usia lebih dari 75 tahun yakni 65,04.



Rasio Jenis Kelamin Penduduk di masing-masing Kecamatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang sama, dan menggunakan data di (tabel 2), hasilnya adalah sebagai berikut :



PIRAMIDA PENDUDUK



RASIO KETERGANTUNGAN



Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*Devendency Ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (Penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk tidak produktif (<15 tahun dan 65 tahun ke atas). Semakin tinggi persentase *devendency ratio*, menunjukkan semakin berat beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan yang tidak produktif lagi.

Rumus untuk menghitung Rasio Ketergantungan adalah :

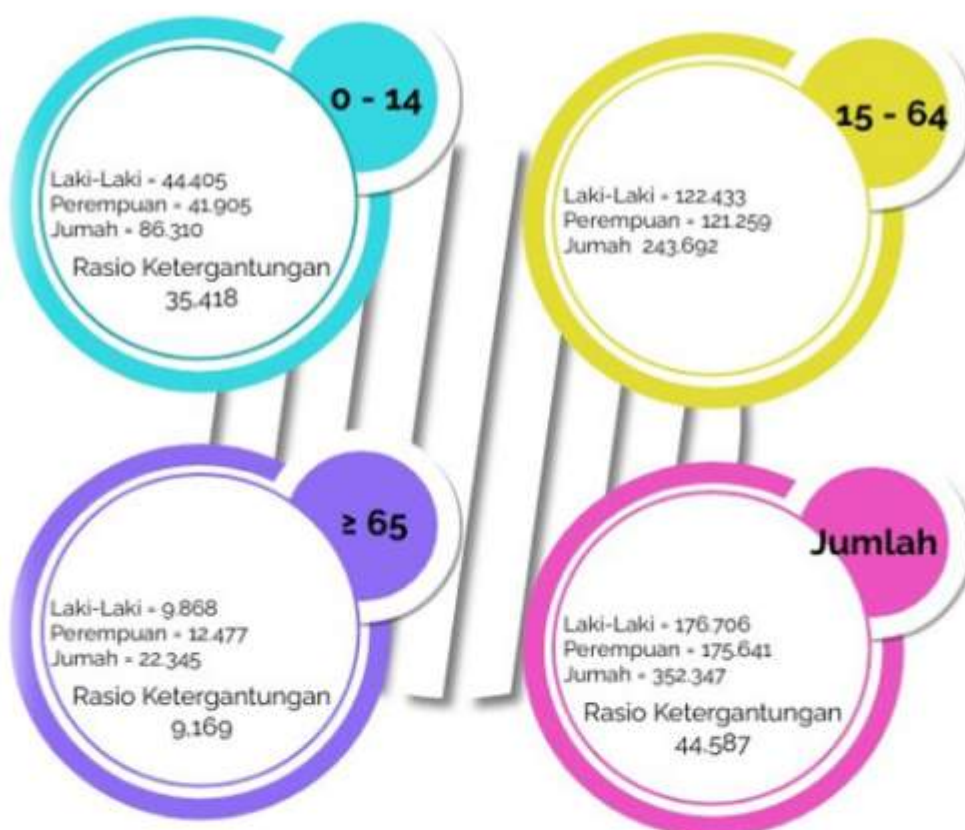
$$RK_{muda} = \left(\frac{P_{0-14}}{P_{15-64}} \right) \times 100$$

$$RK_{tua} = \left(\frac{P_{65+}}{P_{15-64}} \right) \times 100$$

$$RK_{total} = \left(\frac{[(P_{0-14}) + (P_{65+})]}{P_{15-64}} \right) \times 100$$

Rasio Ketergantungan

Struktur Umur Penduduk



Dengan menggunakan data di atas diperoleh :

$$RK_{muda} = (86.310 : 243.692) \times 100 = 0,35417 \times 100 = 35,418$$

$$RK_{tua} = (22.345 : 243.692) \times 100 = 0,09169 \times 100 = 9,169$$

$$RK_{total} = (86.310 + 22.345) : 243.692 \times 100$$

$$= 108.655 : 243.692 \times 100$$

$$= 0,44587 \times 100$$

$$= 44,587$$

$$RK_{total} = 45$$

Interpretasi:

Pada tahun 2023 di Kota Cirebon, dari setiap 100 orang penduduk usia produktif mempunyai beban tanggungan 45 orang penduduk yang belum produktif dan yang sudah tidak produktif.



ANGKA PERKAWINAN KASAR

Angka perkawinan kasar menunjukkan *persentase* penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu. Angka perkawinan ini merupakan indikator perkawinan yang sangat sederhana tanpa





memperhitungkan umur dan jenis kelamin, tetapi bagi daerah-daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga. Angka perkawinan kasar dihitung dengan rumus :

$$M = \left(\frac{M}{P} \right) \times K$$

M = Jumlah Perkawinan dalam satu tahun

P = Jumlah Penduduk pada pertengahan tahun yang sama

$$P = (P_0 + P_t)$$

K = Konstanta = 1.000



Data yang diperlukan :

- Jumlah perkawinan dalam 1 tahun
- Jumlah penduduk awal dan akhir tahun



Catatan :

Jumlah perkawinan dalam 1 tahun sejumlah 2.308

P_0 = Jumlah penduduk awal tahun 2023 adalah 346.438

Jumlah Penduduk pertengahan tahun adalah 348.912

Jumlah Penduduk akhir tahun 2023 (P_1) adalah 352.347

$$\begin{aligned} M &= \left(\frac{M}{P} \right) \times K \\ &= (2.308 : 348.912) \times 1.000 \\ &= 0.0066 \times 1.000 = 6,6 \end{aligned}$$

$$M = 7$$



Interpretasi :

Angka Perkawinan Kasar Kota Cirebon tahun 2023 adalah 7 artinya bahwa di Kota Cirebon tahun 2023 dari 1000 penduduk terdapat 7 kali terjadi peristiwa perkawinan.



ANGKA PERKAWINAN UMUM (AKU)



Angka Perkawinan Umum (AKU) menunjukkan proporsi penduduk berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun tertentu.

Angka Perkawinan Umum lebih cermat dibandingkan dengan Angka Perkawinan Kasar karena dalam perhitungan ini hanya memasukan penduduk yang beresiko kawin saja, yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas sebagai faktor penyebut.

Angka Perkawinan Umum (AKU) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$M_u = \left(\frac{M}{P_{15+}} \right) \times K$$

M_u = Angka Perkawinan Umum

M = Jumlah Perkawinan dalam satu tahun = 2.308

P_{15+} = Jumlah Penduduk usia lebih dari 15 tahun = 265.702

K = Konstanta = 1.000

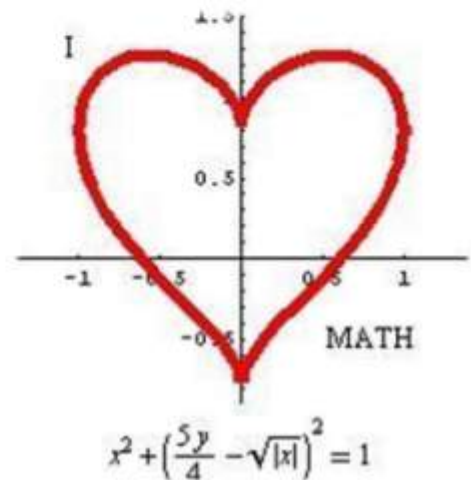
Dengan menggunakan data dari data Angka Perkawinan Kasar dan kelompok umur dari tabel diperoleh :

$$\begin{aligned} M_u &= \left(\frac{M}{P_{15+}} \right) \times K \\ &= (2.308 : 265.702) \times 1.000 \\ &= 0,00868 \times 1.000 \\ &= 8,7 \end{aligned}$$

$$M_u = 9$$

Interpretasi :

Bahwa dari 1000 penduduk Kota Cirebon yang berusia 15 tahun ke atas, pada tahun 2023 terdapat 9 orang yang melakukan perkawinan.





Angka Perkawinan

Kasar (Kelompok Umur)

Usia	Jumlah Penduduk > 15	Jumlah Perkawinan	Angka Perkawinan Kasar
15 - 19	28.082	49	1,74
20 - 24	29.395	678	23,07
25 - 29	28.381	880	31,01
30 - 34	26.688	296	11,09
35 - 39	24.704	136	5,51
40 - 44	28.016	119	4,25
45 - 49	24.727	60	2,43
50 - 54	21.593	35	1,62
55 - 59	17.467	27	1,55
60 - 64	13.764	9	0,65
65 - 69	10.357	11	1,06
70 - 74	6.515	5	0,77
75 +	6.013	3	0,5



RATA-RATA UMUR PERKAWINAN PERTAMA (*Singulate Mean Age At Marriage*)



Rata-rata usia kawin pertama dari penduduk suatu daerah mencerminkan keadaan sosial ekonomi dari daerah tersebut. Perempuan dan laki-laki yang kawin muda biasanya tidak banyak mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga

mereka menikah pada usia muda dan meninggalkan bangku sekolah.

Untuk mendapatkan rata-rata usia kawin pertama yang lebih



cermat para demographer mengembangkan rata-rata usia kawin dari data tentang proporsi penduduk yang masih lajang

menurut umur.

Estimasi rata-rata usia kawin dengan cara ini disebut *Singulate Mean Age at Marriage (SMAM)*.

Definisi *Singulate Mean Age at Marriage (SMAM)* adalah perkiraan (estimasi) rata-rata umur kawin pertama



berdasarkan jumlah penduduk yang masih lajang (belum kawin).



Indikator rata-rata umur kawin pertama dengan metode SMAM akan memudahkan para penentu kebijakan pada

perencanaan pembangunan untuk mengembangkan program pemberdayaan orang muda agar meneruskan sekolah, dan bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan pendidikan keterampilan agar tidak segera memasuki jenjang perkawinan.

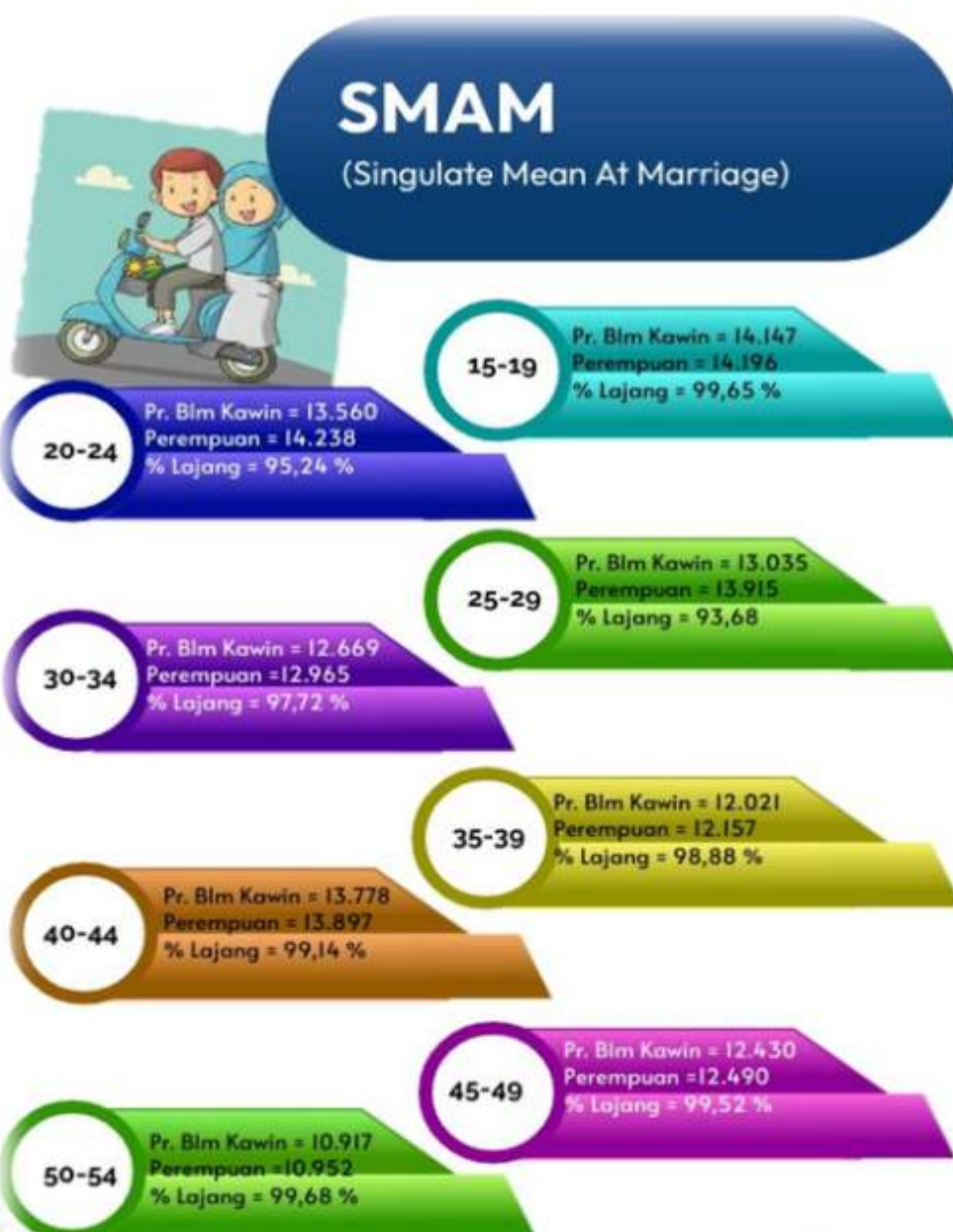
Rata-rata umur kawin pertama (*Singulate Mean Age at Marriage (SMAM)*) yang disajikan merupakan data pada Semester 2,

bukan menyajikan data selama tahun 2022.



Data yang diperlukan :

1. Data penduduk kelompok umur 15-54 tahun menurut kelompok umur lima tahunan dan jenis kelamin.
2. Data Penduduk yang belum kawin pada kelompok umur 15-54 tahun menurut kelompok umur dan jenis kelamin.



ANGKA PERCERAIAN KASAR (Divorce)

Berakhirnya suatu perkawinan selain membawa implikasi demografi juga mempunyai implikasi sosiologi. Implikasi demografi adalah mempengaruhi fertilitas dalam arti mengurangi fertilitas, sedangkan implikasi sosiologi lebih kepada persepsi masyarakat tentang status cerai terutama bagi perempuan.



Angka Perceraian Kasar menunjukkan jumlah perceraian per 1000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan

tahun untuk suatu tahun tertentu.

Angka ini berguna untuk mengetahui gambaran sosiologi suatu daerah yang berkaitan dengan tingkat perceraian.



Angka perceraian kasar ini merupakan indikator perceraian (cerai hidup) yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin, bagi daerah-daerah yang

belum ada atau tidak ada pencatatan perkawinan dan perceraian serta jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam



mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga.

Angka Perceraian Kasar dapat dihitung dengan rumus :


$$D = \frac{D_v}{P} \times K$$

D = angka perceraian kasar

D_v = jumlah perceraian dalam satu tahun

P = jumlah penduduk pada pertengahan tahun = $(P_0 + P_t)/2$





dimana P_0 adalah jumlah penduduk awal tahun dan P_t adalah jumlah penduduk pada akhir tahun, tetapi nilai p kita ambil jumlah penduduk pertengahan tahun dari kenyataan yang ada yaitu pada keadaan tanggal 30 Juni 2023, yakni 348.912.

K = Konstanta = 1000 Jadi,

$$D = \frac{Dv}{p} \times K$$

$$D = (698 : 348.912) \times 1.000$$

$$= 0,002 \times 1.000$$

$$= 2,0005$$

Interpretasi :

Bahwa di Kota Cirebon pada tahun 2023 dari 1000 penduduk terjadi peristiwa perceraian sebanyak 2 kali

ANGKA PERCERAIAN UMUM

Angka Perceraian Umum menunjukkan penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu tahun tertentu. Angka Perceraian Umum lebih cermat dibandingkan dengan angka perceraian Kasar.

Angka Perceraian umum ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$Du = \frac{Dv}{P_{15+}} \times K$$

Du = Angka perceraian umum

Dv = jumlah perceraian dalam satu tahun = 698

P₁₅₊ = jumlah penduduk usia diatas 15 tahun = 265.702

K = konstanta = 1000

Du = (698 : 265.702) X 1.000

= 0,00263 X 1.000

Du = 2,63

Interpretasi :

Bahwa dari 1000 penduduk Kota Cirebon yang berusia 15 tahun keatas pada tahun 2023 terjadi 3 kali peristiwa perceraian.

JUMLAH KEPALA KELUARGA

Keluarga merupakan bagian dari manusia yang setiap hari selalu berhubungan dengan kita. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang dibentuk dari adanya hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang mengikat diri satu sama lain yang



dinamakan pernikahan. Keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup demi tercapainya kesejahteraan sosial.

Status kepala keluarga dalam keluarga inti yang menganut sistem patrilineal dipegang oleh ayah, dan sebaliknya pada keluarga yang menganut sistem matrilineal, kepala keluarga dipegang oleh ibu. Ada sebanyak 115.372 kepala keluarga

yang tersebar di lima kecamatan yang ada di Kota Cirebon. Kecamatan dengan jumlah kepala keluarga tertinggi berada di Kecamatan Harjamukti yaitu 40.705 kepala keluarga, sedangkan kecamatan dengan jumlah kepala keluarga terendah berada di Kecamatan Pekalipan dengan 11.018 kepala keluarga.



Kepala Keluarga



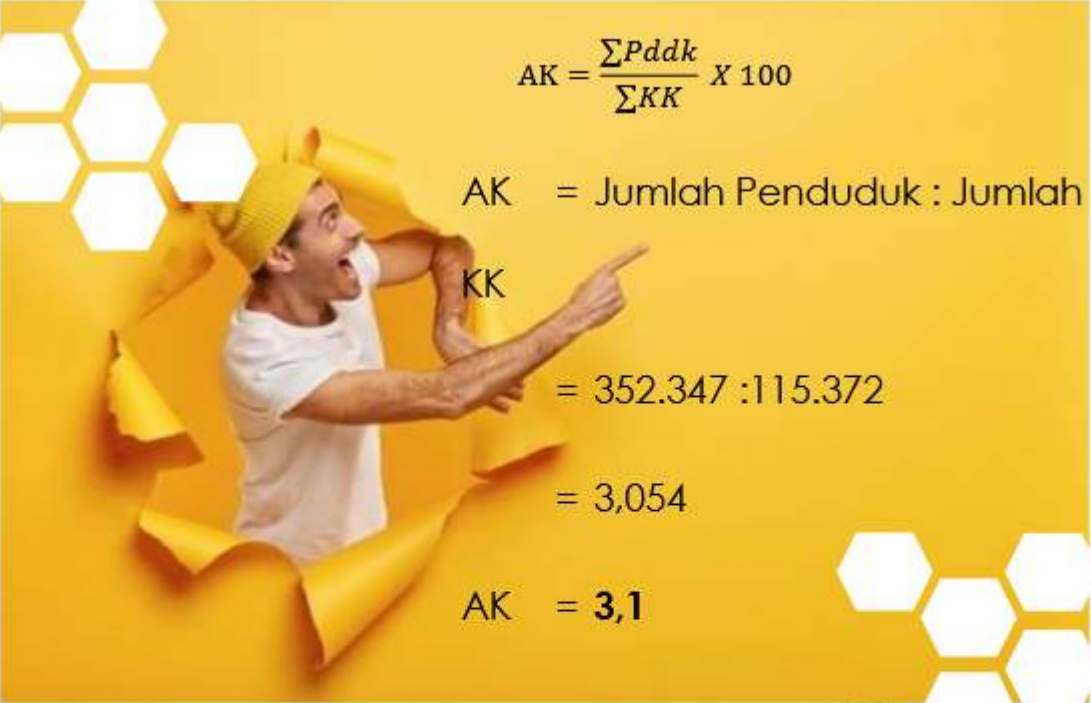
JUMLAH KELUARGA DAN RATA-RATA JUMLAH ANGGOTA KELUARGA

Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam suatu keluarga, dimana diasumsikan semakin kecil jumlah anggota keluarga

biasanya akan semakin baik tingkat kesejahtraannya.

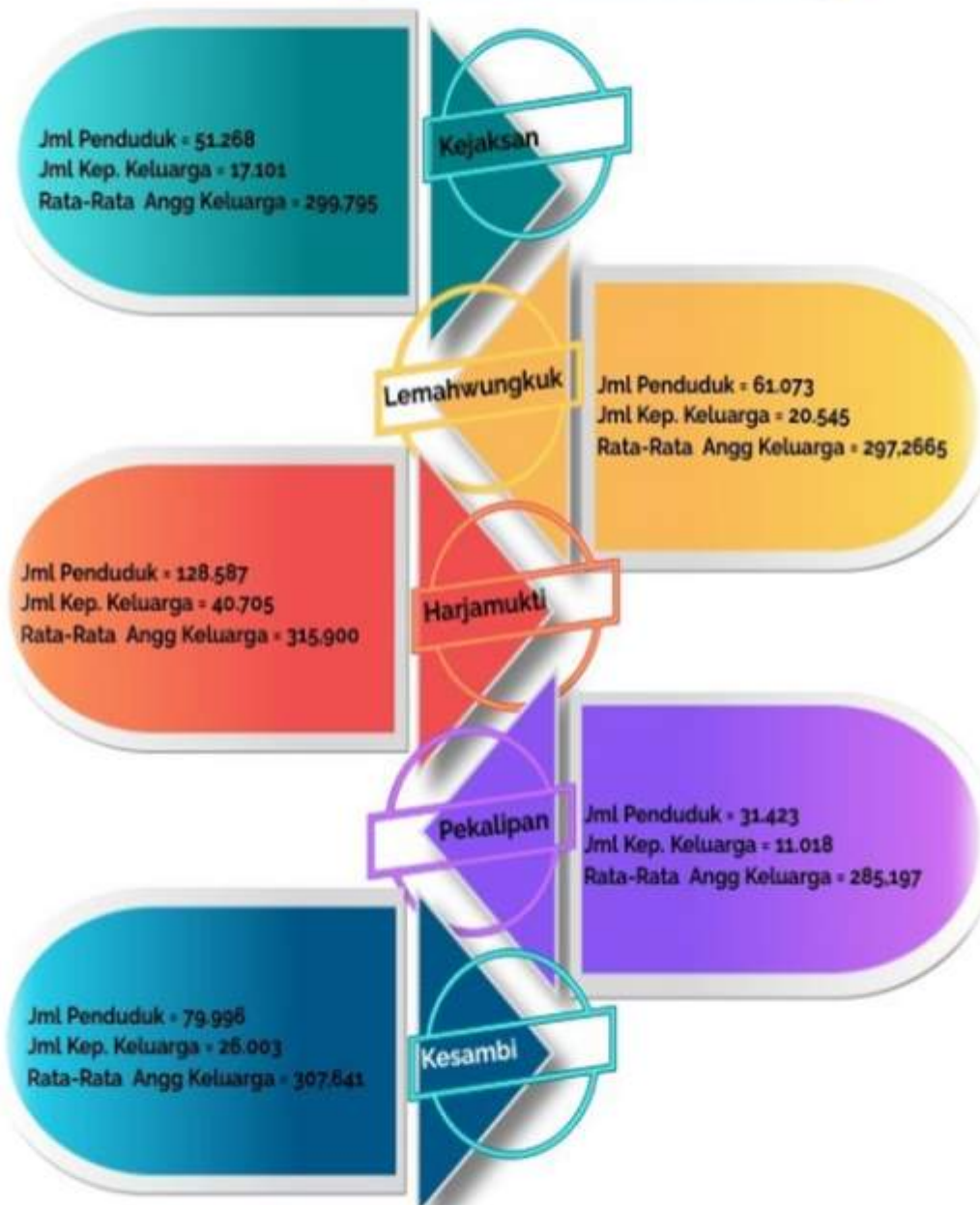
Rata-rata jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga luas menjadi keluarga kecil.

Rumus menghitung rata-rata jumlah anggota :


$$AK = \frac{\sum Pddk}{\sum KK} \times 100$$
$$AK = \text{Jumlah Penduduk} : \text{Jumlah}$$
$$KK$$
$$= 352.347 : 115.372$$
$$= 3,054$$
$$AK = 3,1$$

Rata-Rata

Anggota Keluarga





KARAKTERISTIK KEPALA KELUARGA BERDASARKAN STATUS KAWIN

Kepala keluarga merupakan seseorang baik laki-laki maupun perempuan berstatus menikah maupun tidak, yang mempunyai peran, fungsi dan tanggungjawab sebagai kepala keluarga baik secara ekonomi, sosial maupun psikologi.

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai hidup maupun cerai mati.



Status Perkawinan

Kepala Keluarga

Belum Kawin

Kejaksan - 1.222
Lemahwungkuk - 1.079
Harjamukti - 1.720
Pekalipan - 858
Kesambi - 1.261

Kawin

Kejaksan - 11.300
Lemahwungkuk - 13.941
Harjamukti - 29.495
Pekalipan - 6.922
Kesambi - 18.395

Cerai Hidup

Kejaksan - 1.788
Lemahwungkuk - 2.215
Harjamukti - 3.491
Pekalipan - 1.113
Kesambi - 2.362

Cerai Mati

Kejaksan - 2.791
Lemahwungkuk - 3.310
Harjamukti - 5.999
Pekalipan - 2.125
Kesambi - 3.985

KARAKTERISTIK KEPALA KELUARGA BERDASARKAN PENDIDIKAN



Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia, serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan se-

seorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga



diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga.

Untuk itu jenjang pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga dapat digunakan untuk gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga.





Kepala Keluarga

Menurut Pendidikan

Tidak/Belum Sekolah

Laki-Laki = 722
Perempuan = 733
Jumlah = 1.455

Diploma I/II

Laki-Laki = 920
Perempuan = 345
Jumlah = 1.265

Belum Tamat SD/Sederajat

Laki-Laki = 2.403
Perempuan = 1.461
Jumlah = 3.864

Akademi/Diploma III/S. Muda

Laki-Laki = 3.987
Perempuan = 889
Jumlah = 4.876

Tamat SD/Sederajat

Laki-Laki = 16.638
Perempuan = 8.059
Jumlah = 24.697

Diploma IV/Strata I

Laki-Laki = 10.465
Perempuan = 1.679
Jumlah = 12.144

SLTP/Sederajat

Laki-Laki = 12.094
Perempuan = 4.485
Jumlah = 16.579

Strata II

Laki-Laki = 1.056
Perempuan = 162
Jumlah = 1.218

SLTA/Sederajat

Laki-Laki = 39.824
Perempuan = 9.371
Jumlah = 49.195

Strata III

Laki-Laki = 74
Perempuan = 5
Jumlah = 79

KARAKTERISTIK KEPALA KELUARGA BERDASARKAN STATUS KERJA

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap pos ekonomi keluarga. Oleh sebab itu informasi

Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kerja



mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN



Tingkat pendidikan suatu daerah merupakan salah satu ukuran untuk melihat kualitas penduduk suatu wilayah.

Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusia pada wilayah tersebut. Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan dengan dibuktikan dengan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Dapat diketahui bahwa secara keseluruhan persentase tertinggi berdasarkan tingkat pendidikan penduduk Kota Cirebon adalah



pada jenjang SLTA/Sederajat yaitu 32,72% dimana persentase penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah permintaan tenaga

kerja dengan pendidikan

penduduk mencapai tersebut penduduk pendidikan tertinggi dengan lainnya. Pada dasar,



kriteria minimal SLTA/Sederajat menyebabkan berusaha untuk jenjang pendidikan sehingga jumlah pada tingkat SLTA/Sederajat dibandingkan tingkat pendidikan jenjang pendidikan proporsi penduduk

yang tamat SD untuk penduduk laki-laki lebih tinggi Dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin sedikit pula penduduk yang berhasil menamatkan pendidikannya.



Penduduk

Berdasarkan Pendidikan

Kec. Kejaksan

Tidak/Belum Sekolah

Laki-Laki = 6.829
Perempuan = 6.763
Jumlah = 13.592

Belum Tamat SD/Sederajat

Laki-Laki = 2.338
Perempuan = 2.338
Jumlah = 4.676

Tamat SD/Sederajat

Laki-Laki = 2.641
Perempuan = 3.511
Jumlah = 6.152

SLTP/Sederajat

Laki-Laki = 2.734
Perempuan = 2.943
Jumlah = 5.677

SLTA/Sederajat

Laki-Laki = 8.149
Perempuan = 7.557
Jumlah = 15.706

Diploma I/II

Laki-Laki = 157
Perempuan = 218
Jumlah = 375

Akademi/Diploma II/S. Muda

Laki-Laki = 633
Perempuan = 778
Jumlah = 1.411

Diploma IV/Strata I

Laki-Laki = 1.711
Perempuan = 1.691
Jumlah = 3.402

Strata II

Laki-Laki = 145
Perempuan = 117
Jumlah = 262

Strata III

Laki-Laki = 9
Perempuan = 6
Jumlah = 15

Penduduk

Berdasarkan Pendidikan

Kec. Lemahwungkuk

Tidak/Belum Sekolah

Laki-Laki = 7.034
Perempuan = 6.802
Jumlah = 13.836

Belum Tamat SD/Sederajat

Laki-Laki = 3.746
Perempuan = 3.802
Jumlah = 7.548

Tamat SD/Sederajat

Laki-Laki = 4.760
Perempuan = 5.702
Jumlah = 10.462

SLTP/Sederajat

Laki-Laki = 4.434
Perempuan = 4.443
Jumlah = 8.877

SLTA/Sederajat

Laki-Laki = 9.236
Perempuan = 7.988
Jumlah = 17.224

Diploma I/II

Laki-Laki = 165
Perempuan = 174
Jumlah = 339

Akademi/Diploma II/S. Muda

Laki-Laki = 419
Perempuan = 443
Jumlah = 862

Diploma IV/Strata I

Laki-Laki = 883
Perempuan = 896
Jumlah = 1.779

Strata II

Laki-Laki = 72
Perempuan = 58
Jumlah = 130

Strata III

Laki-Laki = 11
Perempuan = 5
Jumlah = 16

Penduduk

Berdasarkan Pendidikan

Kec. Harjamukti

Tidak/Belum Sekolah

Laki-Laki = 18.521
Perempuan = 17.720
Jumlah = 36.241

Belum Tamat SD/Sederajat

Laki-Laki = 7.090
Perempuan = 6.453
Jumlah = 13.543

Tamat SD/Sederajat

Laki-Laki = 9.431
Perempuan = 10.486
Jumlah = 19.917

SLTP/Sederajat

Laki-Laki = 6.755
Perempuan = 6.940
Jumlah = 13.695

SLTA/Sederajat

Laki-Laki = 15.931
Perempuan = 15.107
Jumlah = 31.038

Diploma I/II

Laki-Laki = 342
Perempuan = 582
Jumlah = 924

Akademi/Diploma II/S. Muda

Laki-Laki = 1.793
Perempuan = 1.912
Jumlah = 3.705

Diploma IV/Strata I

Laki-Laki = 4.582
Perempuan = 4.311
Jumlah = 8.893

Strata II

Laki-Laki = 347
Perempuan = 257
Jumlah = 604

Strata III

Laki-Laki = 17
Perempuan = 10
Jumlah = 27

Penduduk

Berdasarkan Pendidikan

Kec. Pekalipan

Tidak/Belum Sekolah

Laki-Laki = 3.635
Perempuan = 3.317
Jumlah = 6.952

Belum Tamat SD/Sederajat

Laki-Laki = 1.986
Perempuan = 1.703
Jumlah = 3.689

Tamat SD/Sederajat

Laki-Laki = 1.940
Perempuan = 2.513
Jumlah = 4.453

SLTP/Sederajat

Laki-Laki = 2.089
Perempuan = 2.335
Jumlah = 4.424

SLTA/Sederajat

Laki-Laki = 4.935
Perempuan = 4.500
Jumlah = 9.435

Diploma I/II

Laki-Laki = 94
Perempuan = 118
Jumlah = 212

Akademi/Diploma II/S. Muda

Laki-Laki = 341
Perempuan = 359
Jumlah = 700

Diploma IV/Strata I

Laki-Laki = 714
Perempuan = 747
Jumlah = 1.461

Strata II

Laki-Laki = 59
Perempuan = 36
Jumlah = 95

Strata III

Laki-Laki = 0
Perempuan = 2
Jumlah = 2

Penduduk

Berdasarkan Pendidikan

Kec. Kesambi

Tidak/Belum Sekolah

Laki-Laki = 8.761
Perempuan = 8.208
Jumlah = 16.969

Belum Tamat SD/Sederajat

Laki-Laki = 4.377
Perempuan = 4.071
Jumlah = 8.448

Tamat SD/Sederajat

Laki-Laki = 4.752
Perempuan = 5.968
Jumlah = 10.720

SLTP/Sederajat

Laki-Laki = 4.344
Perempuan = 4.519
Jumlah = 8.863

SLTA/Sederajat

Laki-Laki = 12.099
Perempuan = 11.429
Jumlah = 23.528

Diploma I/II

Laki-Laki = 279
Perempuan = 407
Jumlah = 686

Akademi/Diploma II/S. Muda

Laki-Laki = 1.190
Perempuan = 1.435
Jumlah = 2.625

Diploma IV/Strata I

Laki-Laki = 3.681
Perempuan = 3.624
Jumlah = 7.305

Strata II

Laki-Laki = 476
Perempuan = 319
Jumlah = 795

Strata III

Laki-Laki = 39
Perempuan = 18
Jumlah = 57

PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN

Penduduk Kota Cirebon mayoritas beragama Islam sebesar 93,52 %, beragama Kristen 4,04 %, beragama Katholik 1,82 %, beragama Hindu 0,03 %, beragama Budha 0,59 %, beragama Khong Hu Chu 0,02 % dan sebagai penganut aliran Kepercayaan sebesar 0,001 %.

Jumlah Penduduk Menurut Agama

ISLAM

Kejaksan = 49.175
Lemahwungkuk = 56.361
Harjamukti = 121.458
Pekalipan = 26.489
Kesambi = 76.007
JUMLAH = 329.490

KRISTEN

Kejaksan = 1.083
Lemahwungkuk = 2.826
Harjamukti = 5.102
Pekalipan = 2.729
Kesambi = 2.480
JUMLAH = 14.220

KATOLIK

Kejaksan = 647
Lemahwungkuk = 1.370
Harjamukti = 1.703
Pekalipan = 1.528
Kesambi = 1.151
JUMLAH = 6.399

HINDU

Kejaksan = 10
Lemahwungkuk = 24
Harjamukti = 39
Pekalipan = 1
Kesambi = 31
JUMLAH = 105

BUDHA

Kejaksan = 347
Lemahwungkuk = 477
Harjamukti = 272
Pekalipan = 658
Kesambi = 318
JUMLAH = 2.072

KONGHUCU

Kejaksan = 5
Lemahwungkuk = 15
Harjamukti = 13
Pekalipan = 17
Kesambi = 7
JUMLAH = 57

KEPERCAYAAN

Kejaksan = 1
Lemahwungkuk = 0
Harjamukti = 0
Pekalipan = 1
Kesambi = 2
JUMLAH = 4



PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KECACATAN

Infografis menginformasikan bahwa penduduk yang memiliki kecacatan di Kota Cirebon pada tahun 2023 sejumlah 0.214 % atas sebanyak 754 orang.

Penduduk Disabilitas

Tuna Daksa/Fisik

Kejaksan = 15
Lemahwungkuk = 17
Harjamukti = 27
Pekalipan = 14
Kesambi = 27

Tuna Grahita/Mental

Kejaksan = 53
Lemahwungkuk = 50
Harjamukti = 107
Pekalipan = 32
Kesambi = 87

Tuna Netra/Buta

Kejaksan = 5
Lemahwungkuk = 3
Harjamukti = 18
Pekalipan = 10
Kesambi = 13

Cacat Fisik dan Mental

Kejaksan = 9
Lemahwungkuk = 7
Harjamukti = 18
Pekalipan = 2
Kesambi = 5

Tuna Rungu/Wicara

Kejaksan = 21
Lemahwungkuk = 29
Harjamukti = 54
Pekalipan = 20
Kesambi = 38

Cacat Lainnya

Kejaksan = 9
Lemahwungkuk = 7
Harjamukti = 35
Pekalipan = 7
Kesambi = 15

KUALITAS PENDUDUK

Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan

Indikator yang menunjukkan Proporsi penduduk bekerja menurut pekerjaan terhadap jumlah penduduk yang belum bekerja di setiap lapangan pekerjaan.

Proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan menunjukkan distribusi atau penyebaran penduduk yang bekerja di suatu daerah pada waktu tertentu. Indikator ini berguna untuk membantu pemerintah daerah dalam memfokuskan kebijakan ketenagakerjaan.



$$\text{Penduduk bekerja}_{\text{jenis pekerjaan}} = \frac{\sum \text{penduduk bekerja}_{\text{jenis pekerjaan}}}{\sum \text{penduduk bekerja}} \times 100\%$$





Penduduk Menurut Pekerjaan

Belum/Tidak Bekerja

Laki-Laki - 50.128 (14,23)
Perempuan - 44.815 (12,72 %)
Jumlah - 94.943 (26,95 %)

Pelajar/ Mahasiswa

Laki-Laki - 34.371 (9,75 %)
Perempuan - 28.110 (7,98 %)
Jumlah - 62.481 (17,73 %)

Mengurus Rumah Tangga

Laki-Laki - 28 (0,007 %)
Perempuan - 76.513 (21,72 %)
Jumlah - 76.541 (21,72 %)

Bekerja

Laki-Laki - 90.033 (25,55 %)
Perempuan - 25.249 (7,17 %)
Jumlah - 115.282 (32,72 %)

Pensiunan

Laki-Laki - 2.146 (0,61 %)
Perempuan - 954 (0,27 %)
Jumlah - 3.100 (0,88 %)

Jumlah

Laki-Laki - 176.706 (50,15 %)
Perempuan - 175.641 (49,85 %)
Jumlah - 352.347 (100 %)



MOBILITAS PENDUDUK

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah administrasi ke wilayah administrasi lainnya, yang merefleksikan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan tidak meratanya fasilitas pembangunan antara suatu dengan daerah lain.

Analisis tentang migrasi atau mobilitas penduduk merupakan indikator yang paling penting bagi terlaksananya pembangunan



manusia seutuhnya. Tingkat mobilitas penduduk baik mobilitas permanen maupun nonpermanen akan tampak nyata pada satuan

unit administrasi yang lebih kecil dari provinsi, sehingga analisis



mobilitas akan lebih baik bila dilakukan pada wilayah administrasi setingkat kabupaten/kota, kecamatan maupun desa/kelurahan.

Ukuran-ukuran indikator tersebut bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu daerah (kabupaten/Kota) merupakan daerah yang memiliki daya tarik bagi penduduk di wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya

untuk melakukan migrasi. Sebaliknya juga menunjukkan apakah suatu daerah, karena berbagai keterbatasan sumber daya, adanya tekanan atau alasan-alasan tertentu menjadi faktor pendorong bagi penduduk di wilayahnya untuk berpindah ke daerah lain.



BAB V


KEPEMILIKAN DOKUMEN

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen Kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terdiri dari: Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan Sipil. Dalam hal ini yang akan ditampilkan adalah dokumen-dokumen tertentu yang lebih dikenal masyarakat.

Kepemilikan Kartu Keluarga

Kepemilikan Kartu Keluarga berguna untuk mengetahui jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga di hitung dengan menggunakan rumus :


$$\begin{aligned}\%KK &= \frac{\sum \text{Penduduk}_{\text{memiliki KK}}}{\sum \text{Kepala Keluarga}} \times 100 \% \\ &= (115.253 : 115.372) \times 100 \% \\ &= 0,9989 \times 100 \%\end{aligned}$$

$$\% KK = 99,89\%$$

Interpretasi:

Pada tahun 2023 penduduk Kota Cirebon 99, 89% telah memiliki Kartu Keluarga, masih ada 119 Kepala Keluarga yang belum memiliki Kartu Keluarga.

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk



Rumus :

$$\begin{aligned}\%KTP &= \frac{\sum \text{Penduduk}_{\text{memiliki KTP}}}{\sum \text{penduduk}_{\text{wajib ktp}}} \times 100 \% \\ &= (252.064 : 259.685) \times 100 \% \\ &= 0,9707 \times 100 \% \\ \% KTP &= \mathbf{97,07 \%}\end{aligned}$$

Interpretasi:

Penduduk Kota Cirebon usia wajib KTP pada tahun 2023 yang sudah memiliki KTP sebesar 97, 07 %

Kepemilikan akta

Kepemilikan Akta Kelahiran

Presentase kepemilikan Akta Kelahiran berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran dapat dihitung dengan menggunakan rumus :



$$\begin{aligned}\%AL &= \frac{\sum \text{Penduduk}_{\text{memiliki AL}}}{\sum \text{penduduk}} \times 100 \% \\ &= (176.477 : 352.347) \times 100 \% \\ &= 0,5009 \times 100 \% \\ \%AL &= 50,09 \%\end{aligned}$$


Interpretasi :

Di Kota Cirebon pada tahun 2023 dari jumlah penduduk 352.347 jiwa, yang memiliki akta kelahiran sebanyak 50,09 %.

Kepemilikan Akta Perkawinan

Kepemilikan akta perkawinan berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta perkawinan dapat dihitung dengan menggunakan rumus :





$$\begin{aligned}
 \%AK &= \frac{\sum \text{Penduduk memiliki AK}}{\sum \text{penduduk berstatus kawin}} \times 100 \% \\
 &= (117.489 : 154.207) \times 100 \% \\
 &= 0,7619 \times 100 \%
 \end{aligned}$$

$$\%AK = 76,19 \%$$

Interpretasi :

Pada tahun 2023 di Kota Cirebon terdapat 76,19 % penduduk yang memiliki akta perkawinan dari seluruh penduduk yang berstatus kawin.

Kepemilikan Akta Perceraian

Presentase kepemilikan akta perceraian berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta perceraian, dapat di hitung dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned}
 \%AC &= \frac{\sum \text{Penduduk memiliki AC}}{\sum \text{penduduk berstatus cerai}} \times 100 \% \\
 &= (8.321 : 11.535) \times 100 \% \\
 &= 0,7214 \times 100 \%
 \end{aligned}$$

$$\%AC = 72,14 \%$$



Interpretasi:

Pada tahun 2023 di Kota Cirebon terdapat 72,14 % penduduk yang memiliki akta perceraian dari seluruh penduduk yang berstatus cerai.

Kepemilikan Akta Kematian

Presentase akta kematian berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta kematian dapat dihitung dengan menggunakan rumus:




$$\begin{aligned}\%AM &= \frac{\sum \text{Penduduk}_{\text{memiliki AM}}}{\sum \text{Penduduk Mati}} \times 100 \% \\ &= (25.974 : 25.974) \times 100 \% \\ &= 1 \times 100 \%\end{aligned}$$

$$\% AM = 100 \%$$

Interpretasi:

Perlu diketahui bahwa Jumlah Penduduk mati yang digunakan merupakan jumlah penduduk mati yang sudah dilaporkan, bukan jumlah keseluruhan penduduk yang telah meninggal. Sampai





dengan tahun 2023, di Kota Cirebon terdapat 100 % akta kematian dari 25.974 peristiwa kematian yang dilaporkan. Artinya penduduk yang meninggal dan dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, seluruhnya telah diterbitkan akta kematiannya.

Dokumen Pencatatan Sipil

Data kepemilikan akta pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak dan peristiwa penting lainnya. Peristiwa peristiwa penting lainnya yang terjadi di Kota Cirebon pada tahun 2023 berdasarkan registrasi pelayanan sebagai berikut:

Akta Kelahiran	= 6.936 orang
Akta Kematian	= 2.797 orang
Akta Perkawinan	= 100 orang
Akta Perceraian	= 29 orang
Salinan Akta	= 708 orang
Pembetulan Akta	= 458 orang
Perubahan Akta	= 69 orang
Pengesahan Anak	= 24 orang



Pengangkatan Anak	= 2	orang
Pengakuan Anak	= 0	orang
Perubahan Kewarganegaraan	= 1	orang

Surat keterangan

- Pencatatan Kelahiran di Luar Negeri = 18 orang
- Pencatatan Kematian di Luar Negeri = 2 orang
- Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri = 8 orang
- Pencatatan Perceraian di Luar Negeri = 0 orang
- Pembatalan Perkawinan = 0 orang
- Pembatalan Perceraian = 0 orang
- Pelepasan Kewarganegaraan = 0 orang



BAB VI

KESIMPULAN



Data perkembangan kependudukan merupakan data yang strategis yang dibutuhkan dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah

yang berkesinambungan. Perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan bermakna pembangunan yang diselaraskan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada.

A. Kesimpulan

1. Aspek Kuantitas

- a. Jumlah penduduk Kota Cirebon setiap tahun cenderung mengalami peningkatan, sementara luas wilayah Kota Cirebon tetap. Hal tersebut menjadikan tingkat kepadatan



penduduk semakin meningkat, dan apabila tidak diperhatikan akan berdampak pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan perkotaan, yang berimplikasi pada resiko pada kesehatan lingkungan dan persaingan akses fasilitas hidup yang dapat memicu permasalahan sosial.

- b. Proporsi jumlah penduduk Kota Cirebon jenis kelamin laki-



laki yang lebih besar bukan berarti mengesampingkan pembangunan pemberdayaan

perempuan. Usia harapan hidup perempuan yang lebih tinggi dibanding dengan laki-laki, mengindikasikan jumlah kepala keluarga perempuan pada usia lanjut akan lebih besar.



Kelompok perempuan kepala keluarga termasuk kategori

kelompok rentan terpinggirkan dalam kebijakan sosial pemerintah, maka diperlukan kebijakan sosial yang berpihak pada kelompok ini.

c. Pada tahun 2023 ini Kota Cirebon sudah mengalami

“Bonus

Demografi”

yaitu

dimana

jumlah

penduduk

yang



produktif lebih besar dari usia non produktif. Usia produktif di Kota Cirebon mencapai 69,16 %, hal ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya



kondisi ini,

dapat

dijadikan

peluang

bagi

Pemerintah Kota Cirebon untuk memajukan kesejahteraan

warganya dengan syarat masyarakat usia produktif ini



memiliki kualitas sumber daya yang dapat menunjang



serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Kebijakan Pemerintah untuk

memperbaiki kualitas SDM baik pendidikan & pelatihan, kesehatan, kemampuan komunikasi hingga penguasaan teknologi serta penyediaan lapangan pekerjaan perlu didukung semua *stake holder* daerah sehingga kelompok umur produktif ini

dapat tertampung dalam pekerjaan atau bahkan menciptakan



lapangan kerja sendiri.

- d. Kelompok umur non-produktif di atas 64 tahun, berjumlah 22.345 jiwa atau sebesar 6,34 % dan cenderung meningkat dari tahun sebelumnya. Kelompok ini juga didominasi oleh perempuan, hal tersebut membawa konsekuensi bagi



kebijakan Pemerintah Kota Cirebon terkait program kegiatan lansia dan jaminan sosial.

- e. Kepala Keluarga yang mempunyai status pekerjaan



belum/tidak

bekerja berjumlah

2.562 KK. Kepala

Keluarga sebagai

kepala rumah

tangga yang

bertanggung

jawab atas

kebutuhan

keluarga dan

mencari


pendapatan

keluarga. Kelompok ini hendaknya menjadikan prioritas dalam kebijakan pemerintah, agar tidak berimplikasi pada permasalahan sosial lainnya.

2. Aspek Kualitas

- a. Jumlah penyandang disabilitas berjumlah 754 jiwa, meskipun hanya 0,21 % dari jumlah penduduk tetapi masih





diperlukan kebijakan untuk penyediaan akses terutama fasilitas umum dan kebijakan yang berpihak pada kelompok penyandang disabilitas sehingga kelompok ini tetap bisa bersosialisasi dengan warga lainnya.

b. Para Lansia yang menghuni di Panti Wredha karena faktor-faktor tertentu diperlukan kebijakan sosial untuk membantu pengelola panti baik fasilitasi sarana prasarana ataupun anggaran untuk perawatan para penghuninya. Dan jumlah Lansia ini cenderung semakin meningkat, hal tersebut diperlukan kebijakan dan program pemerintah dalam memperhatikan kelompok Lansia ini.

c. Jumlah penduduk miskin di Kota Cirebon sebesar 2.949 orang atau 9,16 %, hal tersebut diperlukan program kebijakan untuk pengentasan mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhannya.



Penduduk miskin

di Kota Cirebon di bidang kesehatan sudah dipenuhi kebutuhannya dengan pembayaran premi JKN-KIS



sehingga kesehatannya sudah dijamin oleh BPJS Kesehatan.



3. Aspek Kepemilikan Dokumen Kependudukan
Kepemilikan dokumen kependudukan warga Kota Cirebon terus ditingkatkan

sehingga warga merasa tenang dan nyaman secara hukum dan keperdataan. Hal tersebut merupakan tantangan bersama yang memerlukan intervensi kebijakan di kalangan internal pemerintah kota dan warga sendiri. Masyarakat harus diedukasi



tentang pemahaman dan kesadaran akan pentingnya data kependudukan yang terintegrasi, sehingga pendokumentasian



data kependudukan dan peristiwa pencatatan sipil dilaksanakan dengan tertib. Aparatur instansi pelaksana data kependudukan perlu ditingkatkan kapasitasnya dengan diorientasikan pada keakuratan dan ketelitian verifikasi formulir agar konsisten antar data dokumen pada saat melayani pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Ada beberapa hal yang perlu perhatian terkait aspek kepemilikan dokumen sebagai berikut :

- a. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2023 sebesar 99,98%. Kepemilikan KK sering menjadi dasar identifikasi kelompok

sasaran program jaminan sosial. Posisi kepala keluarga






seorang perempuan dan lansia terkadang rentan terlewatkan untuk akses program sosial. Keakuratan data dalam Kartu Keluarga ini, sangat menentukan prioritas kebijakan sosial yang diambil pemerintah dalam menyasar kelompok jaminan sosial.

b. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran semua penduduk dan Kartu Identitas Anak (KIA) masih diperlukan dan dijadikan prioritas dalam menentukan program penuntasan dokumen kependudukan. Dokumen tersebut sangat diperlukan

karena menjadi dokumen hukum seseorang dalam urusan keperdataan dan urusan publik.

- c. Program peningkatan dokumen catatan sipil untuk akta kematian (uwis tamat) dan akta kelahiran berhasil meningkatkan cakupan kepemilikan akta kematian dan





akta kelahiran. Cakupan Akta kematian sebesar 100 % dari seluruh pengajuan dan akta kelahiran anak 0-18 tahun sebanyak 94,57 %.


4. Tantangan Bagi Sistem Manajemen Data dan Informasi Kependudukan



Tantangan yang dihadapi untuk pembangunan daerah berwawasan kependudukan di Kota Cirebon :

- a. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya updating data kependudukan masih perlu ditingkatkan. Sosialisasi terhadap pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya updating data telah dilaksanakan sampai tingkat RT/RW. Data yang update dan dapat dipertanggungjawabkan akan menambah kualitas data kependudukan yang dihasilkan. Setiap ada peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil dilaporkan, maka data akan semakin






valid, akurat sehingga pengambilan kebijakan dan program pemerintah dapat dilaksanakan dengan tepat pula.

- b. Pemanfaatan data yang belum terintegrasi antara data penduduk yang diakses instansi eksternal yang mempunyai instansi vertikal di tingkat pusatnya dengan data penduduk yang bersangkutan menjadikan kurang efektifnya sistem. Hal tersebut diperlukan sistem, sehingga ketika penduduk melaporkan perubahan datanya, maka data yang diakses oleh instansi eksternal dapat *up-date* secara sistem.



- c. Cakupan kepemilikan akta kelahiran untuk semua penduduk dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang belum maksimal, diperlukan kebijakan dan kerja sama dengan OPD/instansi/kelurahan sehingga cakupan





akta kelahiran dan KIA untuk semua penduduk Kota Cirebon juga meningkat.

- d. Koordinasi antar lembaga/kementerian yang mempunyai kewenangan mengeluarkan dokumen



kependudukan dan
pencatatan sipil

diperlukan
peningkatan

secara terus-
menerus.

Pencatatan
perkawinan dan

perceraian penduduk yang beragama Islam di KUA atau Pengadilan Agama (Kementrian Agama), pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi oleh Kementrian Hukum & HAM, pelayanan KK-KTP dan akta belum terkoneksi seluruhnya.



B. Implikasi Kebijakan

1. Kebijakan akurasi dan validasi kependudukan

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil perlu mengoptimalkan upaya penyajian kelengkapan data kependudukan, akurasi dan validitas data. Dukungan data yang lebih detil dari dinas/OPD lain sangat dibutuhkan agar akurasi dan kelengkapan data dapat tersaji dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan data kependudukan.

2. Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Kota Cirebon merupakan kota yang padat, menarik warga luar Kota Cirebon untuk bertempat tinggal dan



menetap di Kota Cirebon.

Pertambahan penduduk tersebut perlu untuk

dikendalikan. Upaya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dapat dikoordinasikan bersama-sama lintas

sektor/dinas lain. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain :

1. Memperpanjang waktu penundaan usia kawin
2. Mengatur jumlah kelahiran
3. Mengurangi jumlah kematian
4. Menjaga keseimbangan struktur penduduk.

3. Kebijakan Penataan Ruang dan Penyediaan Sarana Prasarana Berwawasan Kependudukan.

Kebijakan pengembangan kependudukan yang meliputi perkiraan jumlah penduduk di masa mendatang dan



distribusi kepadatan penduduk. Hal tersebut perlu ketersediaan sarana

prasarana kebutuhan warga perkotaan baik sarana prasarana perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Proyeksi kepadatan maksimal penduduk suatu wilayah dapat dijadikan rujukan perencanaan daya tampung dan daya dukung wilayah.

4. Kebijakan Ketahanan Pangan

Perkiraan pertumbuhan penduduk dapat dijadikan pertimbangan dalam kebijakan penyediaan pangan dan sumber kebutuhan energi daerah.

5. Kebijakan Pendidikan

Jumlah penduduk usia pelajar (10-19 tahun) berjumlah 16,82 %, diperlukan perhatian khusus. Di usia pelajar ini perlu dimasukkan program yang berkaitan dengan kewirausahaan dan pendidikan kecakapan agar mempunyai ketrampilan



dan kecakapan tertentu sehingga dapat bersaing dan mempunyai ketrampilan kecakapan tertentu.

6. Kebijakan Ketenagakerjaan



Kota Cirebon sudah mengalami “Bonus Demografi”. Hal tersebut harus dimanfaatkan semaksimalnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan di bidang ketenagakerjaan harus tepat sehingga waktu “Bonus Demografi” tidak terlewatkan sia-sia.

7. Kebijakan Sosial

Data penduduk berdasarkan disabilitas, lansia di panti
wredha,

perempuan

tangga

dijadikan

penyusunan

penanganan

Permasalahan

permasalahan

perlu dipikirkan

perceraian dan

kepala rumah

dapat

pertimbangan

kebijakan

masalah sosial.

sosial merupakan

bersama yang

pemerintah dan masyarakat.

Disabilitas, status sosial memerlukan kebijakan yang berpihak kepada mereka sehingga tetap dapat bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

